

Silahkan upload proposal penelitian tesis Anda dengan komponen:

1. Cover (Judul, Nama dan NIM) + kata pengantar
2. BAB I PENDAHULUAN (LB, RM, TP dan MP)
3. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
4. BAB III METODE PENELITIAN
5. REFERENSI (DAFTAR PUSTAKA) minimal 70% journal.

PROPOSAL PENELITIAN

**PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. TIKI JALUR
NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG PALEMBANG**



**Rani Kesuma Iskandar
192510035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS MANAJEMEN
UNIVERSITAS BINA DARMA
2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian dengan judul “ PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA PADA KINERJA KARYAWAN PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR PALEMBANG ” dengan tujuan untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah metodologi hasil penelitian.

Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan, draft proposal penelitian ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna, namun penulis berharap semoga draft proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi semua pihak yang berkenan memanfaatkannya.

Saya selaku penulis proposal mengucapkan terima kasih kepada bapak dosen Dr. Muji Gunarto, S.Si, ,M.Si., yang telah membantu dan pengarahan dalam penyelesaian proposal penelitian ini. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada rekan mahasiswa magister manajemen angkatan 34 B regular. Saya sebagai penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun untuk perbaikan bahan proposal penelitian ini dikemudian hari.

Palembang, 19 Januari 2020

Rani Kesuma Iskandar

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kesuksesan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam tercapainya tujuan suatu perusahaan (Mariani, 2016). Motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan motivasi juga berpengaruh terhadap prestasi dosen dan kepuasan memberikan pengaruh terhadap prestasi dosen (Yogi yunanto, 2017). Meningkatkan kinerja karyawan adalah salah satu usaha yang akan selalu dilakukan setiap perusahaan untuk tercapainya suatu tujuan. SDM yang berkualitas memiliki dampak besar dalam perkembangan perusahaan. Sedangkan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi membutuhkan metode yang berbeda dalam suatu perusahaan. Motivasi kerja dan disiplin kerja adalah beberapa metode tersebut (Hartanti, 2016).

Banyak perusahaan dihadapkan pada kinerja (Performance) yang bekerja tidak sesuai dengan standar kerja yang sudah ditentukan untuk menunjang tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif. Tidak terkecuali di PT. TIKI JNE Palembang juga mengalami hal yang serupa. Kemungkinan yang menjadi penyebab adalah motivasi kerja mereka yang tidak mendukung kearah pencapaian tingkat produktifitas kerja yang optimal. Disisi lain, motivasi kerja merupakan faktor dalam mencapai prestasi dan produktifitas yang tinggi. Sehubungan dengan itu, dengan melalui manajemen yang benar setidaknya akan memudahkan pengelolaan motivasi kerja karyawan.

Meskipun berbagai jenis motivasi kerja karyawan yang berupa pemberian penghargaan dan insentif dilakukan oleh PT. TIKI JNE Palembang. Tetapi fenomena yang terjadi, motivasi dan disiplin kerja masih belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini dilihat dari masih banyaknya keluhan dari pelanggan terkait keterlambatan pengiriman dan penerimaan barang yang dilakukan oleh PT. TIKI JNE Palembang. Rasa disiplin kerja karyawan yang sebaik baiknya itu harus ditanamkan dalam diri setiap karyawan, sebaliknya bukan atas paksaan atau tuntutan semata tetapi didasarkan atas kesadaran dari dalam diri setiap karyawan. Untuk mendapatkan disiplin kerja yang baik, karyawan harus taat terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan perusahaan, taat terhadap aturan perilaku dalam bekerja dan taat terhadap aturan lainnya diperusahaan.

Keberhasilan suatu perusahaan dilihat dari kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya dengan melihat kemauan atau dorongan untuk bekerja sebaik mungkin agar tercapai tujuan perusahaan yang maksimal yang telah ditetapkan perusahaan sehingga dengan adanya motivasi dan disiplin kerja dari karyawan dapat mengarahkan kemampuan, keahlian, keterampilan dan mematuhi peraturan dalam melaksanakan tugas kinerja karyawan akan lebih baik

Dalam penelitian ini, penulis meneliti motivasi kerja dan disiplin kerja. Apabila mmotivasi kerja baik dan disiplin kerja juga baik, maka kinerja yang dihasilkan pun akan baik juga. Menurut Wursanto dalam (Ashadi, 2011) menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan, keinginan dan kekuatan penggerak yang berasal dari diri manusia untuk melakukan sesuatu. Sedangkan disiplin adalah kepatuhan pada aturan atau perintah yang ditetapkan oleh organisasi (Rika *et.al*, 2016). Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian di PT. TIKI JNE Palembang mengenai hal hal yang berkaitan dengan motivasi kerja dan disiplin kerja melalui penulisan tesis yang berjudul "**Pengaruh Motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Palembang**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. TIKI JNE Palembang
2. Mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. TIKI JNE Palembang
3. Mengetahui pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. TIKI JNE Palembang

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji :

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. TIKI JNE Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. TIKI JNE Palembang
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. TIKI JNE Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi pada penelitian selanjutnya. Bagi PT. TIKI JNE Palembang, penelitian ini mampu memberikan informasi tentang motivasi karyawan dalam bekerja, kinerja karyawan yang harus ditingkatkan dan pengaruh motivasi terhadap kinerja, sehingga nantinya mampu dijadikan masukan untuk peningkatan kinerja karyawan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah keluaran (result) yang merupakan real value bagi perusahaan, misalnya berupa jumlah penjualan, jumlah produksi, tingkat kualitas, efisiensi biaya, profit dan sebagainya.

Menurut Herdiyanto, kinerja adalah hasil dari suatu perilaku seseorang atau kelompok yang terkait dengan cara kerjanya. Pada setiap orang yang bekerja atau dalam suatu kelompok kerja, kinerja selalu diharapkan bisa senantiasa baik kualitas dan kuantitasnya. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2004).

Kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sedangkan kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan. Pengertian kinerja disini tidak bermaksud menilai karakteristik individu tetapi mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh selama periode waktu tertentu (Rukhayati, 2018).

Menurut (Handoko, 2000) Penilaian kinerja terdiri dari 3 kriteria yaitu:

1. Penilaian berdasarkan hasil yaitu penilaian yang didasarkan adanya target-target dan ukurannya spesifik serta dapat di ukur
2. Penilaian berdasarkan perilaku yaitu penilaian-penilaian perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan.

3. Penilaian berdasarkan judgement yaitu penilaian berdasarkan kualitas pekerjaan, koordinasi, pengetahuan, pekerjaan dan keterampilan, kreativitas kerja serta kesadaran dalam penyelesaian tugas dapat dipercaya.

Kinerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan kinerja karyawan sebagai penentu keberhasilan serta kelangsungan hidup perusahaan. Dalam setiap organisasi, manusia merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menghidupkan organisasi tersebut. Hal ini harus didukung dengan kinerja yang baik pula karena tanpa kinerja yang baik, organisasi tidak akan mencapai tujuannya.

Secara umum tujuan dari penelitian kinerja adalah memberikan timbal balik kepada pegawai dalam upaya memperbaiki kerja pegawai, dan untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Secara khusus tujuan penilaian kerja adalah sebagai pertimbangan keputusan organisasi terhadap pegawainya mengenai promosi, mutasi, kenaikan gaji, pendidikan dan pelatihan ataupun kebijakan manajerial lainnya. Kinerja karyawan dapat dinilai dari Kualitas kerja, Kuantitas kerja, Tanggung jawab, Kerja sama, Inisiatif.

Indikator kinerja Menurut Christi (2010), indikator dalam kinerja adalah,

1. Ketepatan Waktu, Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran dalam mengerjakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Kuantitas Seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam periode waktu yang telah ditentukan.
3. Kualitas Setiap pekerja mengenal dan menyelesaikan masalah yang relevan serta memiliki sikap kerja yang positif di tempat kerja.

Pengukuran kinerja karyawan penting dilakukan. Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui apakah karyawan mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau apakah karyawan menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan atau apakah hasil kinerja yang telah dicapai karyawan sesuai dengan yang diharapkan (Diah Indriyani *et.al*, 2015).

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit perusahaan untuk mewujudkan

tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tindakan disiplin digunakan oleh perusahaan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran dari aturan kerja atau dari harapan. Sedangkan keluhan digunakan oleh pegawai yang merasa hak-haknya telah dilanggar oleh organisasi. Tindakan disiplin merupakan suatu pengurangan atau penurunan atau pemotongan yang dipaksakan oleh atasan dalam hal imbalan organisasi karena suatu sebab.

2.1.2. Motivasi Kerja

Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya orang bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Memahami motivasi sangatlah penting karena kinerja, reaksi terhadap kompensasi dan persoalan sumber daya manusia yang lain dipengaruhi dan mempengaruhi motivasi. Pendekatan untuk memahami motivasi berbeda-beda, karena teori yang berbeda mengembangkan pandangan dan model mereka sendiri (Aldo *et.al*, 2014). Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu kekuatan dari dalam diri seseorang, kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi. Sedangkan menurut Robbins (2012) motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya.

Karyawan akan berusaha untuk menutupi kekurangannya dengan melakukan suatu aktifitas yang lebih baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan melakukan aktifitas yang lebih banyak dan lebih baik, karyawan akan memperoleh hasil yang lebih baik pula sehingga keinginannya dapat terpenuhi. Keinginan yang timbul dalam diri karyawan dapat berasal dari dalam dirinya sendiri maupun berasal dari luar dirinya, baik yang berasal dari dalam lingkungan kerjanya maupun dari luar lingkungan kerjanya (Aldo *et.al*, 2014).

Pentingnya motivasi karena motivasi merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia. Supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang memuaskan, motivasi semakin penting karena atasan membagikan pekerjaan kepada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan.

Menurut Hasibuan (2005: 146) menyatakan bahwa tujuan pemberian motivasi bagi seorang karyawan selain memberikan keuntungan pada karyawan itu sendiri juga memberikan keuntungan kepada organisasi perusahaan seperti,

1. Dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
2. Dapat mendorong semangat dan gairah kerja pegawai.
3. Dapat mempertahankan kestabilan pegawai.
4. Dapat meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai.
5. Dapat menciptakan suasana dan hubungan kerja yang pegawai
6. Dapat meningkatkan kreativitas dan partisipasi pegawai.
7. Dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai.
8. Dapat meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai.
9. Dapat mempertinggi rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas- tugasnya.
10. Dapat meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.

Dampak atau efek motivasi atasan berperan penting untuk menumbuhkan motivasi bagi karyawannya karena jika diberikan dorongan baik secara moral maupun materi berupa tunjangan diharapkan dapat memacu dirinya untuk lebih meningkatkan hasil kerja. Menurut Colquitt (2009) efek motivasi berpengaruh terhadap performa kerja dan komitmen organisasi.

1. Motivasi memiliki efek positif yang kuat terhadap kinerja pekerjaan, seseorang yang memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat tugas kinerja yang lebih besar. Efek ini sangat kuat untuk karyawan dalam berkompetensi, di ikuti oleh tujuan yang sulit, Valence, yaitu nilai kedudukan, seseorang atas keberhasilan yang dicapai, misalnya seseorang akan mendapatkan prestise dan bonus jika berhasil dalam memenangkan lomba, Instrumentality, yaitu kesempatan mendapatkan penghargaan yang dijanjikan, dan Expectancy, yaitu harapan atas tindakan yang dilakukan, misalnya seseorang berpikir bahwa ia memiliki kesempatan 50 % memenangkan sebuah lomba, dan equity. Perlu diketahui perilaku warganegara tentang efek motivasi sedikit kontraproduktif, meskipun equity memiliki efek moderat yang positif terhadap efek moderat negatife yang terakhir.
2. Sedikit yang diketahui tentang pengaruh motivasi terhadap komitmen organisasi, meskipun equity memiliki efek moderat yang positif. Seseorang yang

memiliki pengalaman tingkat equity yang lebih tinggi cenderung merasa tingkat komitmen yang lebih tinggi dan afektif dari tingkat komitmen normatif yang lebih tinggi dan sehingga efek pada komitmen yang berkelanjutan lebih lemah.

2.1.3. Disiplin Kerja

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin adalah pelatihan, khususnya pelatihan pikiran dan sikap untuk menghasilkan pengendalian diri, kebiasaan-kebiasaan untuk mentaati peraturan yang berlaku. (Galih *et.al*, 2018). Disiplin merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan keadaan di suatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna melalui suatu sistem pengaturan yang tepat. Disiplin itu sendiri sebenarnya adalah ketaatan terhadap aturan.

Kedisiplinan merupakan faktor yang utama yang diperlukan sebagai alat peringatan terhadap pegawai yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya. Sehingga seorang pegawai dikatakan memiliki disiplin yang baik jika pegawai tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja seorang karyawan tidak hanya dilihat dari absensi, tetapi juga bisa dinilai dari sikap karyawan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan. Karyawan yang mempunyai disiplin tinggi tidak menunda nunda pekerjaan dan selalu berusaha menyelesaikan tepat waktu meskipun tidak ada pengawasan langsung dari atasan (Betaria, 2016).

2.1.3.1. Indikator disiplin kerja

Veithzal Rivai (2005) menjelaskan bahwa, disiplin kerja memiliki beberapa komponen seperti :

1. Kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur kedisiplinan, dan biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja.
2. Ketaatan pada peraturankerja. Karyawan yang taat pada peraturan kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.

3. Ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya.
4. Tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien.
5. Bekerja etis. Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan yang tidak sopan ke pelanggan atau terlibat dalam tindakan yang tidak pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan indisipliner, sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja karyawan.

2.1.3.2. Dampak-dampak Disiplin Kerja

Menurut Leteiner dan Levin (1995) menyatakan disiplin kerja berkaitan dengan ketepatan waktu kerja kemampuan dalam menghasilkan kualitas dan kuantitas kerja yang memuaskan serta semangat kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Individu yang mempunyai disiplin kerja akan memunculkan ketertiban, ketaatan terhadap peraturan dan keinginan bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama (Alferd, 1995).

Dampak dari individu yang mempunyai disiplin kerja adalah sebagai berikut:

1. Datang dan pulang tepat pada waktunya.
2. Semangat kerjanya baik.
3. Menggunakan perlengkapan organisasi hati-hati dan menghasilkan jumlah.
4. Kualitas pekerjaan memuaskan. Disiplin kerja berdampak seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Siagian, 2011).

Setiap perusahaan berupaya agar mampu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan sosial yang selalu berkembang, maka diperlukan mental mempunyai ketaatan terhadap peraturan

2.2. Penelitian Terdahulu

Penulisan ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang serupa sebagai bahan referensi. Referensi tersebut diambil dari penelitian-penelitian yang telah dibuat oleh para pendahulu yang dirasa dapat menunjang sebagai bahan

referensi dalam penulisan penelitian ini. Berdasarkan pemikiran mengenai hal tersebut maka dipilihlah penelitian terdahulu yang memiliki tema yang kurang lebih mirip dengan penelitian yang dilakukan sekarang.

Nama	Judul	Metode	Kesimpulan
Aristarkus Didimus Rumpak(201 6) Jurnal	Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Indonesia Institute	analisis Statistik Inferensial, Analisis Regresi Linear Sederhana	Hasil analisis regresi linear sederhana dengan koefisien korelasi korelasi menyatakan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Bank Indonesia Institute, diperoleh hasil positif dengan hubungan yang sedang / cukup baik. Dengan nilai koefisien penentu dari faktor luar yang masih sangat besar pengaruh dari variabel motivasi kerja.
(Aldo <i>et.al</i> , 2014). Jurnal	Pengaruh motifasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan (Studi pada Karyawan Bagian Produksi PT. Karmand Mitra Andalan Surabaya)	Analisa model persamaan regresi linier berganda atau Multiple Linear Regression	Motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Karmand Mitra Andalan Surabaya, ditunjukkan dengan

			nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan mampu memberikan kontribusi terhadap variabel prestasi kerja 0,660 atau sebesar 66%
Diah Indriani, dkk. (2015) Jurnal	Hubungan Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, Dan Kinerja Karyawan.	Analisis Regresi Linear Berganda, Analisis Koefisien Determinasi	hasil uji t dan uji F, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan
(Rukhayati, 2018). Jurnal	Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Puskesmas Talise	analisis kualitatif dan kuantitatif, persamaan model regresi linear berganda	Motivasi (X1) dan variabel disiplin kerja (X2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai (Y) pada Puskesmas Talise. Dari hasil perhitungan uji t hitung $X1 = 2,203$ pada taraf kesalahan 5% atau nilai probabilitas $0,05 > 0,039$, hal ini

			menunjukkan bahwa motivasi (X1) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kinerja pegawai (Y) pada Puskesmas Talise
(Rika <i>et.al</i> , 2016). Jurnal	Pengaruh disiplin kerja dan motifasi kerja terhadap kinerja karyawan (Studi pada PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten)	Statistical Package of Social Sciences (SPSS), deskriptif analisis dan tes regresi bergand	hasil statistik uji regresi diperoleh nilai disiplin kerja (β) 0,169 (** $p < 0.05$; $p = 0,008$) dan motivasi kerja (β) 0,279 (* $p < 0.05$; $p = 0,000$) berpengaruh positif dan simultan terhadap kinerja karyawan
(Yogi yunanto, 2017). Jurnal	Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja Dosen Universitas Kadiri	model pengukuran (Measurement Model) dan Structural Model atau Causal Model.	model pengukuran (Measurement Model) dan Structural Model atau Causal Model.
(Galih <i>et.al</i> , 2018) Jurnal	Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT.ARAH ENVIROMENTAL INDONESIA BAG.	Teknik pengujian data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.

	SURAKARTA		Hasil pengujian dilakukan dengan uji parsial (uji t) dan menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis nol ditolak. Dengan begitu diketahui bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh disiplin kerja
(Betaria, 2016). Jurnal	Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada PT. Bank BNI 1946 (Persero) Tbk. Kantor Cabang Asia Afrika Bandung	Analisis yang diambil dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis asosiatif	Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji-t diperoleh harga t-hitung lebih besar daripada harga t-tabel ($4,526 > 2,017$), sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil tersebut membenarkan hipotesis penelitian, yaitu terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Bank BNI 1946 (Persero) Tbk Kantor Cabang Asia Afrika Bandung secara signifikan.

2.3. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan

Pelaksanaan disiplin dengan dilandasi kesadaran dan keinsafan akan terciptanya suatu yang harmonis antara keinginan dan kenyataan. Untuk menciptakan kondisi yang harmonis tersebut terlebih dahulu harus diwujudkan keselarasan antara kewajiban dan hak karyawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan sikap kesetiaan dan ketaatan seseorang atau seseorang terhadap peraturan –peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tercemin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Hal demikian membuktikan bila kedisiplinan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Disiplin kerja merupakan bagian atau variabel yang sangat penting dalam pengembangan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, disiplin kerja diperlu-kan dalam suatu organisasi agar tidak terjadi ketele-doran, penyimpangan atau kelalaian yangmenye-babkan terjadinya pemborosan dalam melakukan pe-kerjaan (Nurchahyo, 2011).

2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan

Hal yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja para pegawai yaitu para pegawai membutuhkan motivasi yang baik. Hal tersebut diharapkan agar dalam menjalankan setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan mereka dapat mengerjakan dengan kepercayaan diri yang tinggi, disertai dengan semangat kerja yang tinggi pula. Semakin mereka termotivasi maka akan membuat totalitas mereka dalam bekerja akan semakin meningkat dan akan berdampak positif bagi peningkatan kinerja yang akan mereka capai di perusahaan. Dengan adanya motivasi kerja menjadikan suatu pekerjaan menjadi lebih sempurna.

Untuk mengungkapkan adanya keterkaitan antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, Menurut (Mangkunegara, 2011) hubungan motivasi terhadap kinerja yaitu, “Bahwa seorang karyawan akan bersedia melakukan upaya yang lebih besar apabila diyakini bahwa upaya itu akan berakibat pada penilaian kinerja yang baik dan bahwa penilaian kinerja yang baik akan berakibat pada imbalan yang lebih besar dari organisasi, seperti bonus yang lebih besar, kenaikan gaji,

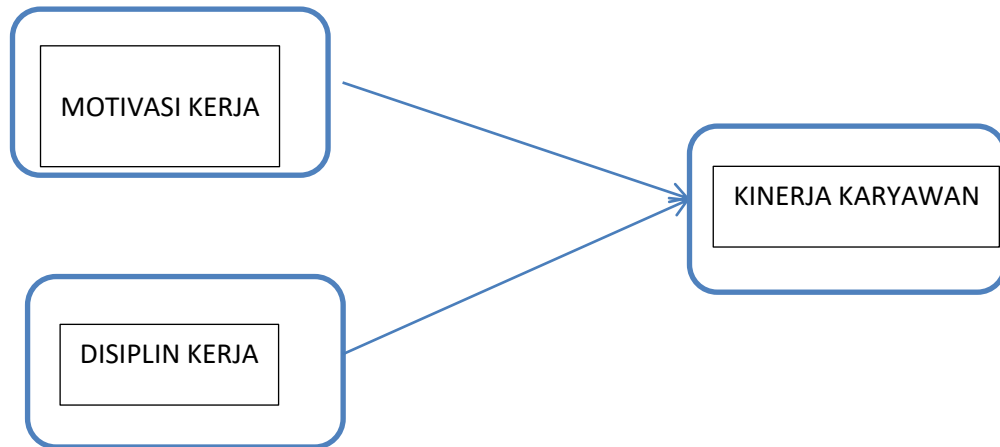
serta promosi dan kesemuanya itu memungkinkan yang bersangkutan untuk mencapai tujuan pribadinya”.

3. Pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan

Perkembangan suatu instansi baik dilihat dari sudut pandang beban tugas, perkembangan teknologi, dan metode kerja yang baru, perlu mendapat perhatian dan respon dari instansi. Oleh sebab itu pemberdayaan pegawai yang akan diberi wewenang dan tanggung jawab, perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta pemberian motivasi serta penetapan disiplin kerja yang tepat untuk tercapainya tujuan utama instansi, serta meningkatkan kinerja setiap karyawan yang ada di instansi tersebut.

Untuk membantu para pegawai agar dapat bekerja dengan semangat tinggi, memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dan totalitas dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan guna tercapainya tujuan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (*JNE*), diperlukan usaha yang keras dari pihak instansi dalam pemberdayaan para pegawai mereka misalnya dengan pemberian motivasi kerja yang baik kepada pegawai dan penetapan disiplin kerja yang tepat di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (*JNE*). Dengan dilakukannya hal tersebut diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja para karyawan yang ada di instansi tersebut. Untuk itu seorang atasan perlu mempunyai ukuran kinerja para karyawan supaya tidak timbul suatu masalah. Artinya, kinerja karyawan memegang peranan penting dalam suatu organisasi. Agar karyawan dapat bekerja sesuai yang diharapkan, maka dalam diri seorang karyawan harus ditumbuhkan motivasi dan disiplin bekerja untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan. Apabila semangat kerja menjadi tinggi maka semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan lebih cepat dan tepat selesai. Pekerjaan yang dengan cepat dan tepat selesai adalah merupakan suatu prestasi kerja yang baik (Toni Listianto, 2012)

Adapun kerangka berpikir dari permasalahan di atas dan berdasarkan dukungan dari teori teori yang tersebut di ats makan dapat disajikan paradigma penelitian atau model dari variabel variabel tersebut adalah sebagai berikut :



2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah keberadaanya, maka perlu di uji kebenarannya. Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang, landasan teori, dan kerangka berpikir, maka formulasi hipotesis yang diajukan untuk diuji kebenarannya dalam penelitian yang dilakukan di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (*JNE*), yaitu:

Ha₁ : Diduga motivasi kerja, disiplin dan kinerja kerja karyawan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (*JNE*) sudah baik.

Ha₂ : Diduga terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (*JNE*)

Ha₃ : Diduga terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (*JNE*)

Ha₄ : Diduga terdapat pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (*JNE*)

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel variabel yang akan diteliti. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka atau skala numerik (Kuncoro, 2003). Penelitian ini menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Populasi dalam penelitian pada karyawan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Palembang yang berjumlah kurang lebih 100 karyawan.

3.2.2. Sampel.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2004).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin (Sevilla, 1994) dalam Husein Umar (2008) yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana : n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi

Sampel yang akan diambil dari populasi menggunakan convenience sampling, yaitu istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. Convenience sampling merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya (Uma Sekaran, 2011). Pengambilan sampel yaitu dengan memberikan dan menjelaskan mengenai kuesioner pada karyawan yang terdapat di ruangan dan jika memadai akan kepada karyawan bagian kurir.

3.3. Instrumen Penelitian.

3.3.1. Kinerja Karyawan

Berdasarkan penelitian dari Riordan dalam Christi (2001) instrumen untuk mengukur kinerja karyawan adalah:

1. Saya dapat mandiri dalam bekerja.
2. Saya masuk tepat waktu dalam bekerja.
3. Saya memahami pekerjaan yang dilakukan.
4. Saya bertanggungjawab terhadap tugas yang dilakukan.
5. Saya menetapkan prioritas kerja dalam bekerja.
6. Saya bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
7. Saya selalu menunjukkan sikap yang positif.
8. Saya mengidentifikasi masalah untuk mencari solusi yang tepat.
9. Saya menyelesaikan semua tugas dalam waktu yang telah ditentukan.
10. Saya menyesuaikan diri dengan perubahan yang tidak terduga dalam tuntutan pekerjaan untuk memenuhi jadwal.

3.3.2. Motivasi Karyawan

Berdasarkan penelitian dari Kinman (2010) maka instrumen yang digunakan sebagai berikut:

1. Saya bekerja ekstra keras jika atasan akan mengevaluasi pekerjaan saya.
2. Saya bekerja dengan jumlah waktu dan jumlah pekerjaan secara tepat.

3. Saya peduli dan tertarik dengan tugas-tugas yang diberikan kepada saya.
4. Saya mau melakukan pekerjaan ini hanya karena gaji.
5. Saya berdisiplin tinggi dalam bekerja untuk menghindari hukuman dari atasan.

3.3.3. Disiplin Kerja

Berdasarkan penelitian dari Riva'i (2005) maka instrumen yang digunakan sebagai berikut:

1. Saya selalu bekerja datang ke kantor secara tertib, tepat waktu dan teratur.
2. Saya selalu berpakaian rapi dalam bekerja.
3. Saya menggunakan peralatan kantor dengan baik dan benar.
4. Dalam bekerja saya mengikuti cara kerja perusahaan.
5. Bekerja secara memuaskan merupakan bentuk disiplin saya dalam bekerja.
6. Saya selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan tugas.

Sebelum kuesioner penelitian digunakan untuk penelitian yang sesungguhnya, kuesioner penelitian ini diuji coba terlebih dahulu. Menurut Arikunto (2005) uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun berpengaruh pada besar tidaknya dan sangat menentukan bermutu tidaknya penelitian. Baik buruknya instrumen penelitian ditunjukkan oleh tingkat kesalahan (validity) dan keandalan (reliability). Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen sehingga dapat diketahui layak tidaknya digunakan untuk pengumpulan data.

3.4. Validitas dan Reabilitas

Untuk mengetahui indikator dalam jabaran variabel sebagai alat pengukur faktor yang bersangkutan, maka perlu dikonfirmasi lebih lanjut, yaitu dengan memeriksa validitas dan reabilitasnya. a. Validitas, dilakukan untuk melihat gambaran tentang kevalidan tiap indikator instrument penelitian. Uji validitas ini menggunakan bantuan program Lisrel versi 9.2 for Student. Indikator dari setiap variabel dikatakan valid jika loading factor $\geq 0,30$. b. Reabilitas, dilakukan untuk

mengetahui konsistensi suatu instrument. Reabilitas suatu konstruk dikatakan baik, jika nilai construct reability-nya $\geq 0,70$.

Berikut ini adalah rumus perhitungan pengukuran reliabilitas:

$$ConstructReability = \frac{(std.loading)^2}{(std.loading)^2 + e_j}$$

Keterangan: $\sum$ = jumlah keseluruhan Std.

loading = standardized loading factors

e_j = kesalahan (error)

Koefisien Jalur (Path Coefficient), pada umumnya merupakan koefisien regresi yang distandarkan. Dia mengukur sisa pengaruh faktor lain kepada suatu variabel laten eksogen, yang kemudian dilakukan tes kecocokan suatu model. Untuk Penelitian ini menggunakan indikator Goodness of Fit Index (GFI) dalam menguji kecocokan model tersebut. GFI adalah ukuran non-statistik yang nilainya berkisar antara 0 (poor fit) sampai 1.0 (perfect fit). Nilai GFI yang tinggi menunjukkan nilai fit yang lebih baik.⁷⁶ Keputusan kesesuaian model didasarkan pada beberapa ukuran uji kesesuaian model (GOF), seperti Chi kuadrat (χ^2) untuk $p > 0,05$; RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) $< 0,08$; GFI (Goodness of Fit Index) $> 0,9$ dan yang lainnya yang akan menguji bahwa perbedaannya tidak bermakna sehingga hipotesis nihil tidak ditolak (signifikan). Jika demikian, maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan antara model teoritis dibandingkan dengan data empiri. Artinya, model teoritis sesuai (fit) dengan data empiri.⁷⁷ Akan tetapi Hox dan Echger menyebutkan goodness of fit dengan Chi kuadrat (χ^2) dengan $p > 0,05$ saja model SEM sudah dikatakan cocok pada data empiris.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak perusahaan pada saat survey, dalam hal ini guna mengetahui permasalahan yang perlu ditindak lanjuti dengan penelitian.

2. Angket/ Kuesioner

Kuesioner dipilih sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya, dan kuesioner inilah yang akan dijawab oleh responden. Kuesioner dipilih karena merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien untuk mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang dimodifikasi dengan menghilangkan jawaban yang di tengah yaitu ragu-ragu, menjadi skala 1 sampai 5 (Hadi, 1991). Dikonversi dalam 5 pilihan angka dengan nilai:

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Ragu-ragu

4 = Setuju

5 = Sangat setuju

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap lanjutan setelah memperoleh data. Analisis ini dilakukan untuk mencari kebenaran dari data yang diperoleh, sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Analisis data yang digunakan dalam studi kepustakaan dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data studi kepustakaan yang telah dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan metode induktif. Metode ini merupakan proses berfikir yang diawali dari fakta-fakta pendukung yang spesifik, menuju pada hal yang bersifat lebih umum untuk memperoleh kesimpulan.⁷³ Fakta-fakta yang dikumpulkan terkait dengan hubungan regulasi diri dengan prestasi belajar matematika, serta menghubungkan dengan teori-teori yang mendukung. Melalui teori-teori yang telah terkumpul tersebut dibentuk suatu variabel-variabel yang saling berhubungan. Selanjutnya variabel-variabel tersebut digunakan dalam pembentukan model kerangka teoritik yang akan diteliti lebih lanjut dalam perhitungan penelitian lapangan. Sedang untuk menganalisis data penelitian lapangan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) melalui

software LISREL. Structural Equation Model (SEM) pertama dikenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Joreskog pada tahun 1970. SEM adalah singkatan dari model persamaan struktural (structural equation model) yang merupakan generasi kedua teknik analisis multivariate yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik recursive maupun non-recursive untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai suatu model. Tidak seperti analisis multivariate biasa (regresi berganda dan analisis faktor). SEM merupakan teknik analisis yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. Hubungan ini dibangun antara satu atau beberapa variabel independen dengan satu atau beberapa variabel dependen. SEM merupakan pendekatan terintegrasi antara dua analisis yaitu analisis faktor dan jalur (path analysis).

Berdasarkan konsep ini tahap penelitian analisis data dengan SEM sebagai berikut:

1. Pengembangan model berbasis teoritis
2. Membuat diagram jalur
3. Pengukuran variabel laten eksogen dan endogen
4. Model persamaan struktural
5. Validitas dan reabilitas

Langkah-langkah SEM:

1. Pengembangan model berbasis teoritis Setelah masalah penelitian berhasil dirumuskan, kemudian dengan basis kerangka teoritis yang telah dibangun pada bab sebelumnya dan kajian hasil penelitian yang relevan, selanjutnya diajukan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian inilah sebagai model yang diusulkan untuk dikonfirmasi secara empiris melalui penggunaan analisis SEM.

2. Membuat diagram jalur Setelah memastikan adanya hubungan sebab akibat pada tahap pertama, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun diagram jalur untuk hubungan-hubungan tersebut. Ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu menyusun model struktural yaitu menghubungkan antar variabel laten baik endogen maupun eksogen dan menyusun measurement model yaitu menghubungkan variabel laten endogen atau eksogen dengan variabel manifest.

Kesepakatan yang ada dalam penggambaran diagram jalur telah dikembangkan oleh LISREL, sehingga tinggal menggunakannya saja. Cara menyusun diagram jalur tersebut telah dijelaskan pada subbab penulisan dan penggambaran variabel.

3. Pengukuran variabel laten eksogen dan endogen Setelah diagram jalur lengkap berhasil dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menghitung skor butir-butir yang valid dan reliabel untuk mengukur variabel laten religiusitas dan regulasi diri (eksogen) dan prestasi belajar matematika endogen). Dalam SEM pengukuran ini menggunakan metode confirmatory factor analysis (CFA). CFA merupakan model pengukuran yang menunjukkan suatu variabel laten diukur oleh satu atau variabel-variabel teramati.

Hasil CFA harus diperiksa terlebih dahulu dari kemungkinan terjadinya offending estimate, selanjutnya dilakukan uji validitas, dan reliabilitas yang akan lebih dijelaskan pada tahap SEM selanjutnya. Kemudian pada tahap lanjutan dari CFA yaitu Second Order CFA (2ndCFA) menunjukkan hubungan antara variabel-variabel laten pada tingkat pertama sebagai indikator dari sebuah variabel laten tingkat kedua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashadi, A. K. (2011). Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang
- Aristarkus Didimus. 2016. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Indonesia Institute. [Internet].. Tersedia pada: [http://asmi.ac.id/e-journals/files/35_2016-Penelitian%20Motivasi%20Kerja%20\(1\).pdf](http://asmi.ac.id/e-journals/files/35_2016-Penelitian%20Motivasi%20Kerja%20(1).pdf)
- Aldo *et.al*, 2014. Pengaruh motivasikerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan (Studi pada Karyawan Bagian Produksi PT. Karmand Mitra Andalan Surabaya). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 13 No. 1-8.
- Betaria, Yusuf Arif. 2016. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada PT. Bank BNI 1946 (Persero) Tbk. Kantor Cabang Asia Afrika Bandung. Jurnal manajemen. Vol. 5 No. 1-12.
- Christi. (2010). Impact of Participative Management on Employee Job Satisfaction and Performance in Pakistan. Journale.Language in India Vol 10.
- Diah Indriani *et.al*. 2015. Hubungan Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, Dan Kinerja Karyawan. Jurnal manajemen dan kewirausahaan. VOL.17, NO. 2,:135–144.
- Galih *et.al*, 2018. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT.Arah Enviromental Indonesia. Surakarta. Jurnal manajemen. Vol.5, No.1. 304-310.

Hadi. (1991).Metodologi Research. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

Kinman, Gail and Russell. (2001).The Role of Motivation to Learn in Management Education.Journal of Workplace Learning.Vol. 3, No. 4.

Kuncoro, M. (2003), Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis.Jakarta: Erlangga

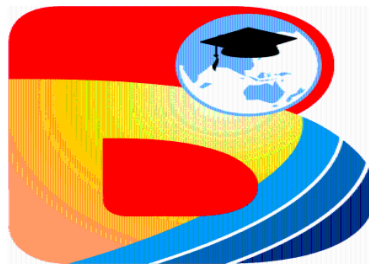
Rika *et.al*, 2016. Pengaruh disiplin kerja dan motifasi kerja terhadap kinerja karyawan (Studi pada PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten) . Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 527-536.

Rivai. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rukhayati, 2018. Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Puskesmas Talise. Jurnal sinar manajemen. Vol 5 No 2, 2598-398.

Yogi yunanto, 2017. Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja Dosen Universitas Kadiri. Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri. Vol 3 No 2, 99-110.

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, BELANJA
MODAL, DAN TEMUAN BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA**



**DISUSUN OLEH
RISNA JUNIATI
NIM. 192510028**

ABSTRAK

Research related to factors that affect the performance of local government (LG) has not been done in Indonesia. Therefore, this study tries to prove whether the characteristics of LG (the size, the level of wealth, the dependence level and the government expenditures) affect the LG performance (scores of Local Government Performance Evaluation/EKPPD which is the main source from Local Government Performance Reporting/LPPD). In addition, this study also wants to prove the influence of Original local government revenue, General Allocation Fund, Capital Expense and audit findings to the LG performance. By using multiple regression methods to the 75 LGs for year 2014, this study provides evidence that the size, the level of wealth, and the dependence level have positive effect on LG performance. While government expenditures and the audit findings have negative effect on LG performance.

Keywords: Characteristic of Local Government, Local Government Performance, Local Government Performance Reporting, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Audit Findings.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desentralisasi di Indonesia yang dimulai pada Tahun 2001 mengalihkan berbagai macam kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah seperti politik luar negeri, keamanan, pertahanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah yang seluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, pada kenyataannya kebijakan otonomi yang diterapkan oleh pemerintah pusat belum dapat berjalan baik karena relatif masih banyak kesenjangan yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. (Adi, 2005: 2). Adapun kesenjangan ini disebabkan karena pembangunan antar daerah yang tidak merata dan sumbangan akan hasil eksploitasi yang tidak merata. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk pandai menyelenggarakan pemerintahannya sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemerintah Daerah.

Terkait dengan hal itu, dalam lampiran penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Ruang Lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Oleh karena itu isi dari LPPD Kabupaten/Kota sangat tergantung dari karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 2 menjelaskan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Kemudian, pedoman pelaksanaan EKPPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 5 menjelaskan sumber utama EKPPD adalah LPPD yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) berisikan data capaian kinerja yang diisi oleh masing-masing SKPD dengan tugas fungsinya dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim Penilai. Hasil EKPPD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas: Laporan Hasil Evaluasi Individu untuk masing-masing daerah, dan Laporan Hasil Pemingkatan dan Status Daerah secara nasional. Laporan hasil penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pertama kalinya diselenggarakan untuk LPPD Tahun Anggaran 2007.

Tabel 1
Skor Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota
di Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Ogan Komering Ulu	2,4887	2,8871	2,9876	2,8911
2	Ogan Komering Ulu Timur	2,9105	2,8944	2,8131	2,7045
3	Ogan Ilir	2,8625	2,9143	3,0434	2,8794
4	Ogan Komering Ilir	3,0303	3,1362	3,1356	2,9652
5	Lahat	3,0799	3,0835	3,0574	2,8902
6	Banyuasin	3,0846	diekspos	2,9786	2,8655
7	Musi Banyuasin	3,0727	diekspos	3,0575	2,8552
8	Muara Enim	3,0685	3,1114	3,1195	2,991
9	Ogan Komering Ulu Selatan	2,7398	2,8824	2,7696	2,7084
10	Musi Rawas	3,068	3,1092	3,1996	2,941
11	Empat Lawang	2,6623		2,8922	2,8034
12	Lubuk Linggau	2,9331	3,067	2,9761	2,759
13	Palembang	2,6894	2,9114	3,0734	3,0488
14	Pagar Alam	2,6133	2,6741	2,9768	2,8673
15	Prabumulih	2,5976	2,9593	3,0161	2,9642
Sumber : Kemendagri data diolah					

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menurut (Halim, 2001: 125) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Sumatera Selatan memiliki 17 (tujuh belas) kabupaten/kota, terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten merupakan hasil pemekaran dan 7 (tujuh) kabupaten induk.

Menurut (Aryanto, 2011: 2) kabupaten/kota tersebut dituntut untuk memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan tidak tergantung dengan dana

perimbangan pusat. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

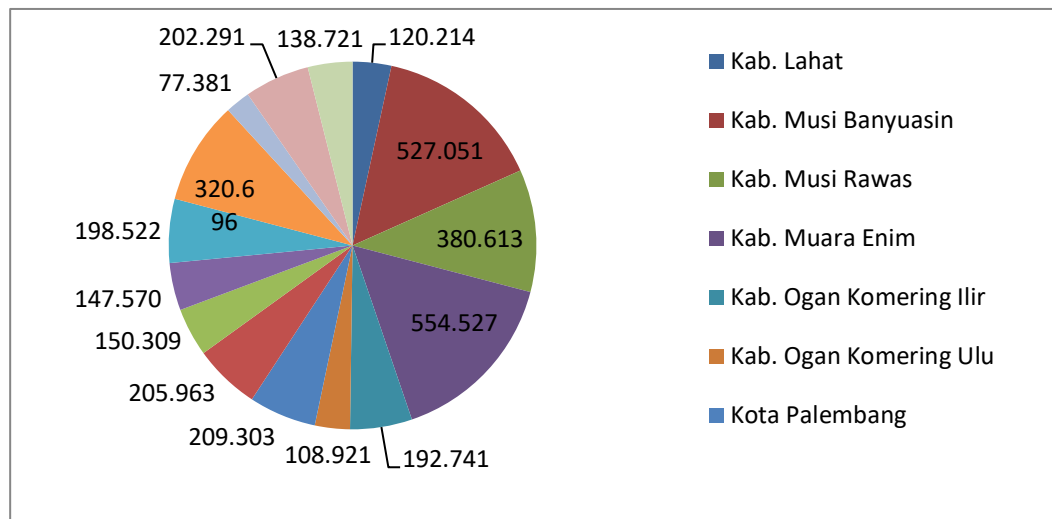
Tabel 2
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten/ Kota
di Sumatera Selatan

							dalam jutaan	
Kabupaten/Kota	Tahun							
	2014		2015		2016		2017	
	PAD	DAU	PAD	DAU	PAD	DAU	PAD	DAU
Kab. Lahat	40,500	355,796	35.151	362.587	51.733	442.109	76.525	516.937
Kab. Musi Banyuasin	32,570	86,728	39.773	80.256	53.749	294.985	88.207	327.551
Kab. Musi Rawas	53,223	388,998	60.000	352.330	72.506	467.450	76.131	537.624
Kab. Muara Enim	58,121	399,028	70.908	371.879	62.161	463.445	82.716	580.314
Kab. Ogan Komering Ilir	30,506	533,746	30.051	541.732	37.479	670.310	41.061	743.453
Kab. Ogan Komering Ulu	37,413	304,463	38.598	298.401	39.866	375.427	42.913	456.823
Kota Palembang	196,108	689,109	224.461	696.587	263.010	787.613	458.534	934.084
Kota Prabumulih	16,826	191,965	21.146	197.965	24.009	247.679	26.877	299.642
Kota Pagar Alam	10,000	174,703	12.502	180.687	18.957	230.466	25.966	268.912
Kota Lubuk Linggau	25,378	207,020	28.830	209.946	30.135	267.775	35.019	328.282
Kab. Banyuasin	20,005	441,350	20.005	451.231	28.376	539.462	31.189	651.358
Kab. Ogan Ilir	15,252	282,738	25.867	288.392	16.102	363.062	30.134	446.519
Kab. OKU Timur	11,087	361,076	31.717	382.018	26.487	456.813	23.041	541.449
Kab. OKU Selatan	4,555	253,297	6.594	261.025	13.113	338.641	13.207	397.058
Kab. Empat Lawang	6,089	190,027	10.060	192.640	10.905	244.628	14.603	274.671
Sumber : DJPK Depkeu (diolah)								

Dari Tabel 2 di atas, komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBN tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan per tahunnya. Dari Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp98,030 triliun (0,14%) di tahun 2015 kemudian Rp92,92 triliun (0,12%) pada tahun 2016 dan Rp 317.536 triliun (0,29%) tahun 2017. Komposisi Dana Alokasi Umum pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp7,632 triliun kemudian tahun 2016 sebesar Rp 1,322 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp1,114 triliun.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak

pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik.

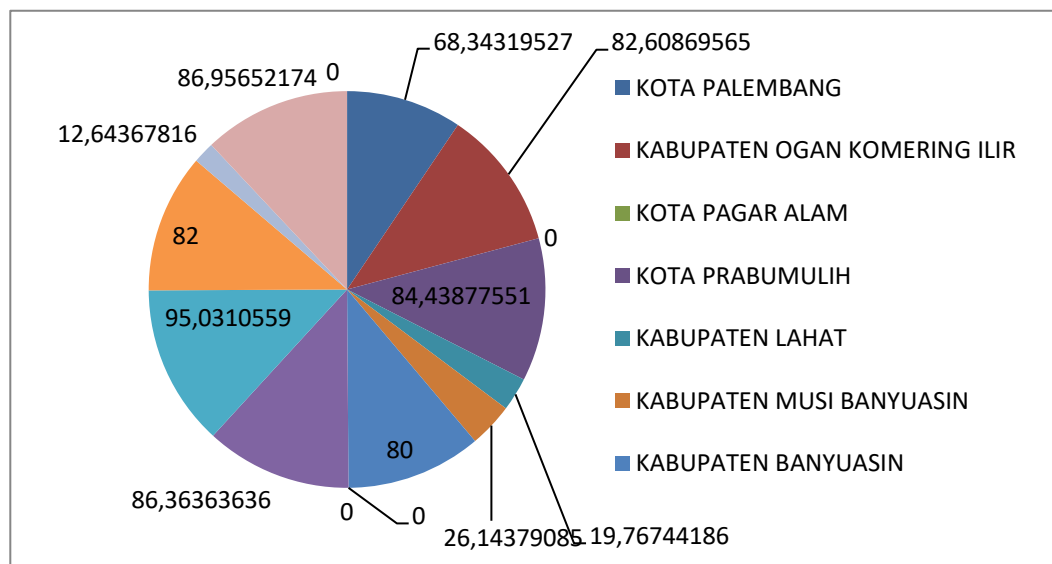


Gambar 1
Realisasi Belanja Modal Tahun 2014 Kabupaten/ Kota
di Sumatera Selatan (dalam jutaan rupiah)

Sumber : DJPK Depkeu (data diolah)

Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan LPPD suatu Pemda sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan (fraud). Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan mekanisme peringatan dini (*early warning system*) untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan aktivitas sebagai kontribusi untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien Kertiwa, (2006) dalam Arifianti dkk, (2013: 2488). Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, semakin banyak temuan audit merupakan salah satu indikasi rendahnya kinerja pemerintah daerah. Berikut penyelesaian temuan pengawasan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan:



Gambar 2
Penyelesaian Tindak lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2014
Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan (persentase)

Sumber : Inspektorat Provinsi (data diolah)

Dari Gambar 2 di atas, dapat dilihat untuk tahun 2014 bahwa Kabupaten Musi Rawas memiliki penyelesaian atas temuan audit yang tinggi yaitu sebesar 95%, lalu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu 86,5% dan Kabupaten Muara Enim sebesar 86,3%. Kemudian untuk Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Lubuk Linggau untuk penyelesaian tindak lanjut temuan audit masih 0%.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

- Bagaimana pengaruh tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, penyediaan fasilitas infrastruktur dan pengawasan inspektorat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, penyediaan fasilitas infrastruktur dan pengawasan inspektorat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti lainnya yang berminat dibidang ini:

1. Memberi manfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan khususnya dalam upaya peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan mengenai kinerja keuangan daerah dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh indikator keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Menambah referensi untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keuangan Daerah

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengambil keputusan dan pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut selanjutnya dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat yang bersangkutan (Boex, 2001: 13). Desentralisasi fiskal terdiri dari empat pilar (Boex, 2001: 14) yaitu:

1. Pengeluaran, mengatur mengenai fungsi dan tanggung jawab pengeluaran untuk masing-masing tingkat pemerintahan.
2. Pendapatan, berkenaan dengan sumber-sumber penerimaan objek pajak atau non pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah.
3. Transfer, berkenaan dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan;
4. Pembiayaan, sebagai penyeimbang antara pendapatan dan pengeluaran daerah.

Dari penjelasan diatas teori Boex dapat digunakan sebagai dasar dari variabel tingkat kekayaan daerah, yang dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keuangan Daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang

belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan

Dapat dikatakan sumber pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pendapatan Asli Daerah Pasal 7 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Dari definisi tersebut di atas pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda, pendapatan denda pajak,

denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Oleh karena itu pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah untuk terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi secara bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

2.1.2 Teori Desentralisasi

Teori ini untuk menjelaskan variabel tingkat ketergantungan pada pusat yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Darise, 2007: 37).

Desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan *parastatal* (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah (Rondinelli dan Cheema, 1983) dalam (Taufiz, 2010: 6).

Selanjutnya (Rondinelli, 2002) dalam (Taufiz, 2010: 6)., memberikan 4 dimensi desentralisasi yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3
Kategori Desentralisasi Menurut Rondinelli

No	Kategori desentralisasi	Tujuan	Instrumen
1	Desentralisasi politik	Meningkatkan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik	Perbedaan konstitusi dan undang-undang, pengembangan partai politik, penguatan legislatif,

		mereka dalam pembuatan keputusan publik	pembentukan institusi politik lokal, pendukung kelompok kepentingan publik yang efektif
2	Desentralisasi administrasi	Memperbaiki efisiensi manajemen untuk penyediaan layanan publik	Dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi masing-masing dengan karakteristik yang berbeda.
3	Desentralisasi fiskal	Memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional.	Pengaturan kembali dalam pengeluaran, penerimaan dan transfer fiskal antar tingkatan pemerintahan
4	Desentralisasi ekonomi dan pasar	Menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi dunia usaha dan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respon terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme pasar	Transfer fungsi pemerintahan kepada organisasi bisnis, kelompok masyarakat atau ornop melalui privatisasi dan penguatan ekonomi pasar melalui deregulasi

Sumber : Rondinelli, disarikan (2002)

2.1.3 Teori Desentralisasi Fiskal

Menurut teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari 3 fungsi yaitu (Musgrave, 1993) dalam (Taufiz, 2010: 8) :

1. Alokasi

Fungsi alokasi sangat terkait erat dengan kewenangan utama bagi pemerintah daerah karena menyangkut alokasi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Alokasi kepada masyarakat tersebut terutama terhadap barang publik yang nilainya relatif sangat besar tetapi swasta tidak dapat menyediakan.

2. Distribusi

Adalah peran pemerintah dalam perekonomian dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat. Jadi dalam hal ini pemerintah

menjamin bahwa seluruh golongan masyarakat dapat mengakses sumber ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang layak. Fungsi distribusi ini memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proporsional dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal.

3. Stabilisasi

Adalah peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga stabilisasi perekonomian secara makro (*agregat*) misalnya mengendalikan laju inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan dan lain-lain. Oleh karena itu fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi variabel ekonomi makro dengan berbagai instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dengan demikian fungsi ini lebih banyak dimiliki pemerintah pusat dibanding pemerintah daerah.

Menurut (Demelo, 2000) dalam (Taufiz, 2010: 4) desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan.

Selanjutnya teori mengenai dampak desentralisasi terhadap perekonomian yang menekankan keuntungan alokasi desentralisasi menurut (Hayek, 1945) dalam (Taufiz, 2010: 5) proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing, sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang dan jasa publik dibanding penyediaan hal tersebut oleh pemerintah pusat. Keadaan ini disebut *allocative efficiency*. (Tiebout, 1956) dalam (Taufiz, 2010: 10) memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang

dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Hal ini tidak terjadi jika pemerintah pusat sebagai penyedia barang dan jasa publik yang seragam.

Selanjutnya pandangan teori (Musgrave, 1959) dan (Oates, 1972) dalam (Taufiz, 2010: 10) lebih menekankan pentingnya *revenue* dan *expenditure assignment* antar level pemerintahan. Teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi.

2.1.4 Teori Transfer Fiskal

Transfer adalah elemen inti dari keuangan daerah, dan secara substansif tidak dapat dikatakan baik ataupun buruk, karena yang menjadi persoalan terletak pada pengaruhnya terhadap hasil-hasil kebijakan yang dilaksanakan seperti efisiensi alokasi, pemerataan distribusi, dan stabilitas makro ekonomi (Taufiz, 2010: 12).

Terdapat tiga cara dasar untuk menetapkan jumlah dana yang perlu didistribusikan ke daerah melalui transfer fiskal antar strata pemerintahan (Bird dan Vailancourt, 2000) dalam (Taufiz, 2010: 12), yaitu :

- Menurut persentase tetap dari penerimaan pemerintah pusat.
- Mengikuti suatu dasar *ad hoc*, yaitu dengan cara yang sama seperti untuk jenis-jenis pengeluaran anggaran yang lain.
- Dasar formula, yaitu menurut persentase dari pengeluaran-pengeluaran daerah tertentu yang dibayar oleh pusat, atau yang berhubungan dengan beberapa ciri umum daerah penerima.

Menurut (Boex, 2001) dalam (Taufiz, 2010: 12) transfer dapat berbentuk *block grants*, yaitu bantuan yang diberikan sebagai suatu bentuk pembayaran kembali dari pengeluaran aktual pengeluaran pemerintahan daerah. Bentuk lainnya adalah *matching grant* yaitu bantuan yang diberikan dengan proporsi tertentu dari pengeluaran pemerintah

daerah. Bentuk lainnya adalah kontribusi pendapatan (*revenue sharing*) dimana pemerintah daerah menerima share pendapatan tertentu yang dikumpulkan dalam wilayah kekuasaannya. *Revenue sharing* digolongkan sebagai transfer disebabkan karena pemerintah daerah tidak mempunyai kontrol atas wajib pajak, tingkat pajak, pengumpulan pajak, atau tingkat pembagian (*sharing rate*).

Rosen (2002) dalam (Taufiz, 2010: 12), membagi jenis grant menjadi 2 (dua) macam yaitu *conditonal grant* atau *categorical grant* dan *unconditional grant*. *Conditional grant* adalah transfer khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan khusus. Jadi *conditional grant* serupa dengan *matching grant*. *Unconditonal grant* diberikan kepada pemerintahan daerah tanpa persyaratan tertentu dan pada umumnya berkaitan dengan usaha-usaha produktif untuk investasi pada badan usaha. Sering juga *unconditional grant* disebut *revenue sharing*.

Pakar ekonomi lainnya, (Fisher, 1996) dalam (Taufiz, 2010: 12) mendefinisikan grants/transfer digolongkan berdasarkan empat faktor :

1. Penggunaannya didasarkan pada persyaratan khusus atau umum
2. Metode alokasinya berdasar formula, atau menghendaki suatu persetujuan yang dihubungkan dengan proyek tertentu.
3. Jumlahnya disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan jumlah ketersediaan dana atau berdasarkan kebutuhan penggunaan dari pemerintah daerah penerima.
4. Ukuran potensial transfer dibatasi.

Berdasarkan definisi diatas maka pola transfer sangat variatif dan alternatif yang tersedia secara teoritis sebagai landasan dalam implementasi disuatu negara yang dipengaruhi akan kondisi spesifik dari suatu negara.

2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*)

Teori ini digunakan untuk menjelaskan variabel penyediaan fasilitas infrastruktur yang tercermin dari pengeluaran pemerintah pada belanja modal, semakin besar pengeluaran pada belanja modal semakin banyak sarana yang dibangun dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik.

Menurut Wagner dalam (Mangkoesoebroto, 1993: 170) mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, US dan Jepang pada abad ke 19, hukum tersebut berbunyi : dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner ini memiliki kelemahan karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangan dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

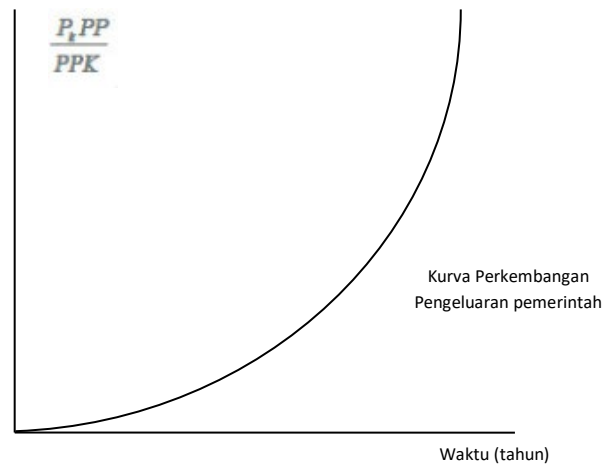
$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

PkPP : Pengeluaran Pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/ jumlah penduduk

1,2,...n : Jangka waktu (Tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar 3 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993: 172).



Gambar 3
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

Sumber : Mangkoesoebroto (data diolah)

Teori Peacock & Wiseman dalam (Mangkoesoebroto, 1993: 176) menyatakan bahwa “Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar”.

Musgrave (1959) dalam (Mangkoesoebroto, 1993: 179) menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

1. Peningkatan pengeluaran untuk memproduksi barang dan layanan publik sebagai akibat dari pertumbuhan perkapita, perubahan teknologi, perubahan populasi penduduk, biaya relatif pelayanan publik serta urbanisasi.
2. Perubahan ruang lingkup transfer.
3. Kemampuan dalam pemungutan pajak
4. Efek threshold dan pembiayaan perang
5. Faktor-faktor sosial dan politik

Menurut Boediono (2001: 50) pengeluaran pemerintah adalah semua pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran barang dan jasa yang dihasilkan dalam ekonomi ada 4 komponen (Sukirno, 2004: 38), yaitu: (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) Pengeluaran pemerintah; (3) Pembentukan modal sektor swasta; (4) Ekspor neto. Selanjutnya, masih menurut Sukirno (2006: 169) pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan pada pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional.

Pengeluaran pemerintah daerah (belanja daerah) menurut Darise (2007: 42-47) diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja adalah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap dan atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hiba, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya diperlukan secara langsung oleh adanya kegiatan atau program. Kelompok belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pengeluaran pemerintah dapat disimpulkan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan aktivitas pemerintah. Sebagian pengeluaran pemerintah digunakan untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran kegiatan pembangunan. Pengeluaran pemerintah dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan da

na untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran pemerintah mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan.

2.1.6 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) dalam (Suhardana dan Rardjo, 2013: 2) ini digunakan untuk variabel kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah teori ini menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak, yang muncul ketika satu orang atau lebih sebagai pemilik (*principal*) untuk mempekerjakan orang lain (*agent*) agar dapat memberikan suatu jasa kepada *principal* dan kemudian mendelegasikan wewenang pengembalian keputusan kepada *agent* tersebut. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh *agent* dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Di satu sisi, *agent* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abdullah, 2005: 7). Menurut Lane (2000; 12-13) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen.

Dalam lingkup pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat beberapa hubungan keagenan, yaitu antara masyarakat dan pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD, dan DPRD dengan pemerintah daerah menurut (Nuraeni, 2012) dalam (Hermin, dkk, 2013: 2481).

Kemudian, teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat *principal* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Setiawan, 2012) dalam (Suhardana dan Rardjo, 2013: 2).

Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004 (UU No.15/2004) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *informatif asymetri* yang terjadi dapat berkurang. Dengan demikian berkurangnya *information asymetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012) dalam (Suhardana dan Rardjo, 2013: 3).

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah daerah (*agent*)

untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Hal ini dapat menjelaskan variabel Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memperlihatkan capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang dilakukan oleh pemerintah selaku *agent* terhadap masyarakat selaku *principal*.

2.1.7 Fungsi Pengawasan Inspektorat

Menurut, Bastian (2001) dalam (Werimon, 2013: 34) pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah provinsi (ITWILPROP), Inspektorat Wilayah Kota (ITWILKOT), Inspektorat Wilayah Kabupaten (ITWILKAB) Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), merupakan aparat pengawas fungsional. Badan ini secara taktis operasional berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, sedangkan secara taktis berada dibawah pembinaan kepala daerah. Sedangkan secara teknis administratif berada dibawah pembinaan Menteri Dalam Negeri (Irjen Depdagri). Berdasarkan pasal 2 Kep.Mendagri No. 110/1991, Inspektorat mempunyai sejumlah tugas, yaitu melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintah umum, yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan masyarakat dilingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah umum, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, pembinaan social politik, perekonomian, kesejahteraan social, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, kekayaan Negara dan daerah dan lain-lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.
- b. Melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur atau instansi dilingkungan pemerintah daerah atas petunjuk Kepala Daerah.

- c. Melaksanakan pengusutan terhadap kebenaran laporna atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, pembinaan social, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, dan kekayaan Negara/daerah.
- d. Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian, serta pengusutan dilaksanakan oleh inpektorat pembantu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam pada itu, bagian tata usaha bertugas menyiapkan bahan kordinasi pengawasan dan memberikan pelayan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Selanjutnya, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susmanto, 2008) dalam (Efendy, 2010: 28).

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;

2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Kemudian kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi, namun peraturan ini hanya mengatur mengenai Standar Audit APIP. Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:

1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum;
2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif;
3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

Kemudian, APIP melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (fungsi *quality assurance*). Pengawasan yang dilaksanakan APIP diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan tersebut.

Lembaga/badan/unit yang ada di dalam tubuh pemerintah (pengawas intern pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari: pertama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); kedua, Inspektorat Jenderal Departemen; ketiga, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) /Kementerian; dan keempat, Lembaga Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota. (Susmanto, 2008) dalam (Efendy, 2010: 30)

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tentang uraian tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adalah membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Provinsi Sumsel mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Selatan.

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi pengawasan fungsional, dalam pelaksanaannya mempunyai peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan Kinerja pada Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk menilai terhadap operasi suatu organisasi atau audit atas pengelolaan keuangan negara daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD agar berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, serta taat terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan tersebut lebih menekankan pada aktivitas pencegahan dari pada penindakan dengan memberikan saran kepada pimpinan SKPD dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan menertibkan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Pemeriksaan Keuangan dan Aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dituntut berperan aktif, disamping melakukan reviu laporan keuangan, juga melakukan pemeriksaan terhadap keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap kehandalan pelaporan keuangan, penatausahaan dan pemanfaatannya serta untuk menertibkan kepemilikan aset dan proses pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, buku dan laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan didukung oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Pelaksanaan reviu tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperoleh opini WTP dari BPK-RI.

4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan pada seluruh unit kerja dan pengelolaan sumberdayanya, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mulai Tahun 2008 telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi LAKIP tersebut dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja pada unit kerja eselon I dan II dengan pendekatan komprehensif atas kinerjanya yg disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP merinci pengendalian intern ke dalam 5 (lima) unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern yg dituangkan dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek *Soft Control* yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin

dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofi manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta revidi lainnya.

6. Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK, masih terdapat beberapa kendala dimana banyaknya rekomendasi/saran yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil pengawasan fungsional tersebut antara lain pihak ke tiga/rekanan sudah berpindah alamat, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi, adanya dokumen yang hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah meninggal, serta hasil pengawasan kurang jelas. Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian negara, maupun yang bersifat administratif.

Salah satu upaya yang ditempuh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan opini WTP, yaitu melaksanakan pemantauan secara efektif terhadap seluruh unit kerja dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan BPK-RI. Di samping itu perlu segera disusunnya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sistematis sehingga memudahkan dalam percepatan pelaksanaan tindak lanjutnya.

7. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sesuai mandatnya selain melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, juga mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk mejamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

Dengan demikian, penetapan keberadaan Fungsional Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), merupakan peluang dan sekaligus tantangan untuk meningkatkan kinerja APIP, sehingga mau tidak mau seluruh APIP baik yang melaksanakan tugas administratif maupun teknis fungsional harus merubah pola pikir dan pola tindak untuk bersinergis dan bersatu padu dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu tugas Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adapun salah satu tugasnya yaitu Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Dalam pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK, masih terdapat beberapa kendala dimana banyaknya rekomendasi/saran yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian negara, maupun yang bersifat

administratif. Oleh karena itu perlu segera disusunnya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sistematis sehingga memudahkan dalam percepatan pelaksanaan tindak lanjut. Sehingga, upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah dapat berjalan secara baik.

2.1.8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tugas dan wewenang kepala daerah yaitu memberikan laporan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah. Bentuk laporan pertanggungjawaban yang lebih rinci dijelaskan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. Muatan informasi ILPPD merupakan ringkasan LPPD. Kinerja merupakan hasil/keluaran dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggararaan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009) (Arifianti dkk, 2013: 2481)

Kemudian, tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB). EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, *self assessment*) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai. (Subagyo, 2009: 3)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). Setelah itu dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian penghargaan kepada penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama. Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (Sudharsanah dan Rahardjo, 2013: 4).

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian terdahulu mengenai analisis Pengaruh Indikator Keuangan Daerah dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan menggunakan alat analisa yang berbeda. Namun hanya beberapa penelitian yang dijadikan peneliti sebagai referensi pada penelitian ini.

Arifianti, dkk (2013: 2477) menganalisis pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan alat analisis *multiple regression* dengan metode *purposive sampling* diambil 197 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan ekstern yang dilakukan oleh masyarakat dan hasil pemeriksaan oleh BPK terkait kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai sarana perbaikan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang. Sementara itu, fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh DPRD tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota dewan masih lebih mementingkan partainya daripada kinerja daerahnya.

Sudarsana dan Rahardjo, (2013: 1) meneliti tentang karakteristik suatu pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat) dan temuan audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilihat dari skor kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia selama tahun 2010. Dengan total sampel 367 pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel ukuran

pemerintah daerah dengan proksi total aset, variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan proksi DAU dibanding total pendapatan dan variabel belanja modal dengan proksi belanja modal dibanding total realisasi belanja terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sedangkan, variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja, variabel tingkat kekayaan daerah dengan proksi PAD dibanding total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

Mustikarini dan Fitriasisari, (2012: 12) menganalisis karakteristik suatu pemerintah daerah dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk tahun 2007. Dengan total sampel 275 pemerintahan daerah. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa semua variabel karakteristik Pemerintah Daerah dan juga temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah daerah sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemerintah daerah.

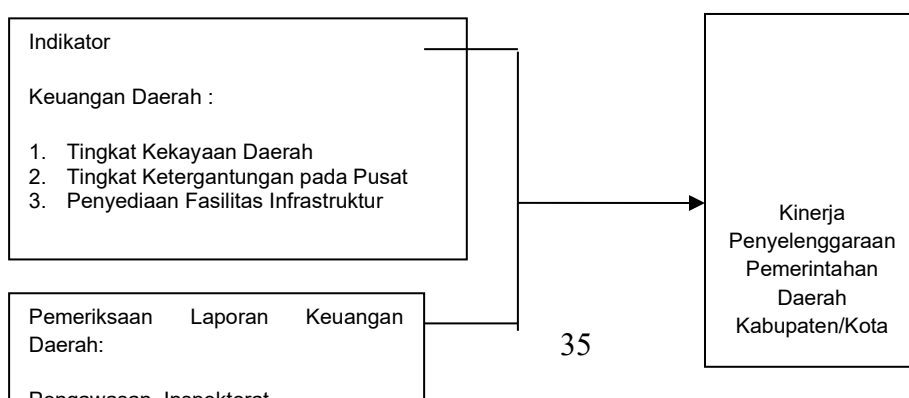
Marfiana dan Kurniasih, (2012: 11) Menguji karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan kesimpulan: Ukuran pemerintah daerah; tingkat kekayaan daerah; dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.

Primadona, (2010: 1) melakukan penelitian untuk mengetahui besar pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintah Kota Bandung. Populasi penelitian sebanyak 14 (empat belas) ditujukan pada Kepala Dinas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki kelemahan yaitu kemampuan pegawai dalam mengelola keuangan daerah masih kurang, karena terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang memahami pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Indikator Keuangan Daerah dapat dilakukan dengan melihat tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat dan penyediaan fasilitas infrastruktur. Untuk mengidentifikasi kekayaan daerah dapat dilihat dari perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan. Selanjutnya untuk menentukan tingkat ketergantungan pada pusat dilihat dari perbandingan Dana Alokasi Umum dengan Total Pendapatan, untuk penyediaan fasilitas infrastruktur dilihat dari perbandingan belanja modal dengan realisasi belanja.

Kemudian dilakukan penelitian dengan melihat pengawasan keuangan daerah dengan menggunakan indikator variabel pengawasan inspektorat dilihat dari jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan variabel independen menggunakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2009 – 2013.



Gambar 4 **Kerangka Pemikiran**

2.4 Hipotesis

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Sumarjo (2010) bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Saragih (2003) dalam Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda.

Hipotesis 2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Selain ukuran dan tingkat kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan Pemda kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat juga berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk

penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari alokasi DAU sehingga hal ini memotivasi Pemda untuk berkinerja lebih baik. Dengan demikian, semakin tinggi ketergantungan Pemda pada pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Sumarjo (2010) yang mengungkapkan bahwa *intergovernmental revenue* (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Begitu juga dengan penelitian Ahmad (2011) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro

Hipotesis 3: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Jika ketiga karakteristik di atas terkait dengan kekayaan dan pendapatan Pemda maka karakteristik keempat ini akan dilihat dari sisi belanja Pemda. Menurut UU No. 32/2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja Pemda seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi skor kinerja Pemda tersebut.

Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Purba (2006) yang membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun dan Rustiono (2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Provinsi Jawa Tengah.

Begitu juga dengan Sjoberg (2003) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dan investasi dengan kinerja ekonomi makro di Swedia selama kurun waktu 1960-2001.

Hipotesis 4: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda.

Penelitian yang menghubungkan temuan audit langsung dengan kinerja Pemda belum ada. Namun penelitian yang dilakukan oleh Bernstein (2000) menyimpulkan adanya hubungan antara pengukuran kinerja Pemda dan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program.

Hipotesis 5: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan diatas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan, Penyediaan fasilitas infrastruktur pada pusat berpengaruh positif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. dan Temuan Hasil Audit yang berpengaruh negatif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya menguji Pengaruh Indikator Keuangan Daerah yaitu kekayaan daerah (Pendapatan Asli Daerah), ketergantungan pada pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum), fasilitas infrastruktur (Belanja modal) dan pengawasan keuangan daerah yang dilihat dari pengawasan oleh Inspektorat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini mengambil sampel dari 15 (lima belas) Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2014). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/ kota di Sumatera Selatan pada tahun 2014 -2018. Total populasi adalah 75 (tujuh puluh lima) yakni 15 (lima belas) kabupaten/ kota pada 5 (lima) tahun.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang telah disediakan oleh pihak ketiga, dan tidak berasal dari sumber langsung. Data tersebut berupa Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014-2018 yang dipublikasikan melalui website Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Dalam Angka dan Sumatera Selatan Dalam Angka.

Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari beberapa sumber, yakni:

- a. Kementerian Dalam Negeri, berupa data skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, data berupa jumlah tindak lanjut temuan BPK yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi. BPS Provinsi Sumatera Selatan,

- c. Data berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Total Pendapatan, Belanja Modal dan Realisasi Belanja
- d. Dinas/ Instansi lain yang terkait berupa data keuangan yang kurang pada BPS Provinsi Sumatera Selatan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku, serta melihat dan mengambil data-data yang diperoleh dari situs resmi instansi yang terkait dalam penelitian ini.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan variabel independen yang terdiri dari; keuangan daerah dimensinya adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan inspektorat berupa tindak lanjut temuan pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi. Selain itu juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran daerah. Variabel dan pengukurannya secara lengkap dapat disajikan dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4

Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Dimensi dan Definisi	Indikator	Ukuran
1.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,	Skor indeks yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.	Skor

		dan/atau dampak.		
2.	Tingkat Kekayaan Daerah	Tingkat Kekayaan Daerah dapat dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) peningkatan PAD faktor pendukung dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi yang tinggi sehingga mendorong perbaikan infrastruktur daerah dan akan meningkatkan PAD pada pemerintahan daerah tersebut.	Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan	Rasio
3	Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat setiap kabupaten/ kota berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU).	Perbandingan antara Dana Alokasi Umum dengan total pendapatan.	Rasio
4	Penyediaan Fasilitas Infrastruktur	Penyediaan Fasilitas Infrastruktur dapat tercermin dari rasio belanja modal dengan realisasi belanja. Semakin besar rasio semakin banyak sarana yang dibangun dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik.	Perbandingan Belanja Modal dengan total realisasi belanja	Rasio

5.	Pengawasan Keuangan Daerah	Pengawasan Inspektorat yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adapun tugasnya yaitu Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Dalam pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional hasil pemeriksaan oleh BPK, masih terdapat rekomendasi/saran yang belum ditindaklanjuti oleh auditan.	Jumlah tindak lanjut temuan BPK yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi	Rasio
----	----------------------------	--	--	-------

Sumber : Arifianti, Hermin dan Payamta dan Sutaryo (2013)

3.6 Model Penelitian

Penelitian ini bermaksud menganalisis Pengaruh Indikator Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah yang terdiri dari tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, pengawasan inspektorat terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Sumatera Selatan. Dalam pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik berupa software Microsoft Excel, dan *Eviews*. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut.

$$KPPDit = \alpha + \beta_1 TKDit-1it-1 + \beta_2 TKPit-1 + \beta_3 PFIit-1 + \beta_4 PINPTRT it-1 + \epsilon_i$$

keterangan:

- KPPDit : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah i tahun t
- TKDit-1 : Tingkat kekayaan daerah i pada tahun t
- TKPit-1 : Tingkat kemandirian/ ketergantungan pada pemerintah pusat i pada tahun t
- PFlit-1 : Penyediaan Fasilitas Infrastruktur i pada tahun t
- PINPTRT it-1 : Pengawasan Keuangan Daerah pada pemda i tahun t
- A : Konstanta
- ϵ_i : *Standard error*
- $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien regresi / parameter

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis kuantitatif deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistika yang berkaitan dengan metode atau cara medeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan atau menguraikan data. Statistika deskripsi mengacu pada bagaimana menata, menyajikan dan menganalisis data, yang dapat dilakukan misalnya dengan menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, standar deviasi atau menggunakan cara lain yaitu dengan membuat tabel distribusi frekuensi dan diagram atau grafik. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh kemampuan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota Sumatera Selatan.

Tabel 5

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Nilai Koefisien Korelasi	Keterangan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah

0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2006: 216)

A. Metode Pemilihan Model

Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji F untuk memilih model mana yang terbaik diantara ketiga model tersebut dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk menguji antara model *commont effect* dan *fixed effect*. Sedangkan uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *fixed effect* atau *random effect*. Dalam melakukan uji Chow, data diregresikan dengan menggunakan model *common effect* dan *fixed effect* terlebih dahulu kemudian di buat hipotesis untuk diuji. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

Ho : digunakan model *common effect* (model pool)

Ha : digunakan model *fixed effects* dan lanjut uji Hausman

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *probability F* $\geq 0,05$ artinya Ho diterima; maka model *common effect*.
2. Jika nilai *probability F* $< 0,05$ artinya Ho ditolak; maka model *fixed effect*, dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau metode *random effect*.

Selanjutnya untuk menguji Hausman Test data juga diregresikan dengan model *random effect*, kemudian dibandingkan antara *fixed effect* dan *random effect* dengan membuat hipotesis:

Ho : Model *Random effect*

Ha : Model *fixed effect*,

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman

adalah sebagai berikut:

1. Jika Nilai *probability Chi-Square* $\geq 0,05$, maka H_0 diterima, yang artinya model *random effect*.
2. Jika Nilai *probability Chi-Square* $< 0,05$, maka H_0 diterima, yang artinya model *fixed effect*.

B. Analisis Regresi Data Panel

Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Dengan mengakomodasi Dalam model informasi baik yang terkait *variable – variable cross section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted variables*, model yang mengabaikan variabel yang relevan Gujarati (2003). Persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, n$$

dimana n adalah banyaknya data *cross-section*. Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t ; t = 1, 2, \dots, t$$

dimana t adalah banyaknya data *time-series*. Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it} \quad i = 1, 2, \dots, n ; t = 1, 2, \dots, t$$

dimana :

n = banyaknya observasi

t = banyaknya waktu

$n \times t$ = banyaknya data panel

Dalam Rohmana (2010:241), bahwa dalam pembahasan teknik estimasi model regresi data panel ada 3 teknik yang dapat digunakan yaitu:

1) Model dengan metode OLS (*common*)

Model *Common Effect* merupakan model sederhana yaitu menggabungkan seluruh data *time series* dengan *cross section*, selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*).

2) Model *Fixed effect*.

Pendekatan efek tetap (*Fixed effect*). Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time-series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

3) *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model (REM) digunakan untuk mengatasi kelemahan model efek tetap yang menggunakan *dummy variable*, sehingga model mengalami ketidakpastian. Penggunaan *dummy variable* akan mengurangi derajat bebas (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. REM menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antarindividu. Ini berarti REM mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki perbedaan intersep yang merupakan variabel random.

C. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (*multiple regression analysis*), karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006). Untuk melakukan analisis regresi berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Jarque Bera, uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Tidak ada metode yang paling baik atau paling tepat. Tipsnya adalah bahwa pengujian dengan metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa pengamat, sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari keragu-raguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik dari pada pengujian dengan metode grafik.

Penelitian ini menggunakan Uji Jarque Bera sering digunakan dalam Uji Normalitas pada variabel Residual hasil dari Uji Regresi Linear karena kemampuannya yang sangat baik dalam mendeteksi normalitas pada residual. Untuk menguji data yang berdistribusi normal dilihat dari nilai *Jarque-Bera* (JB Test) > nilai χ^2 (*Chi Square*) tabel.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas di dalam model, peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai *Tolerance* < 0.5 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila ternyata dalam model terdapat multikolineritas, peneliti akan mengatasi hal tersebut dengan transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linier di antara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk *first difference* atau delta.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross section* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang

terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ada tidaknya masalah autokorelasi, peneliti akan menggunakan uji *Durbin Watson* dengan alat bantu *Eviews*. Menurut Ghazali (2005), jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif.

Tabel 6
Interval Nilai Statistik d-Durbin Watson

Nilai Durbin Watson	Keterangan
$d < 4dL$	Ada autokorelasi positif
$D > 4dL$	Ada autokorelasi negatif
$dU < d < 4 - dU$	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif
$dL \leq d \leq dU$	Pengujian tidak meyakinkan
$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$	Pengujian tidak meyakinkan

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, atau besar) (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model, peneliti akan menggunakan uji *Glejser* dengan bantuan program SPSS. Apabila koefisien parameter beta > 0.05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.

D. Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Uji Signifikan Simultan (Uji F) dan Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji F digunakan untuk mengetahui bahwa variabel *dependent* yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *independent* yaitu tingkat kekayaan daerah (rasio PAD dengan total pendapatan), tingkat ketergantungan pusat (rasio DAU dengan total pendapatan), penyediaan infrastruktur (rasio belanja modal dengan total belanja), dan pengawasan inspektorat. Uji statistik dalam pengujian hipotesis dalam persamaan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tingkat kekayaan daerah (rasio PAD dengan total pendapatan), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (rasio DAU dengan total pendapatan), penyediaan infrastruktur (rasio belanja modal dengan total belanja), dan pengawasan inspektorat secara bersama-sama tidak berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

H_1 : Tingkat kekayaan daerah (rasio PAD dengan total pendapatan), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (rasio DAU dengan total pendapatan), penyediaan infrastruktur (rasio belanja modal dengan total belanja), dan pengawasan inspektorat secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterangan:

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_i = 0$

H_1 : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_i \neq 0$

H_0 : berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_1 : berarti secara bersama-sama ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji signifikansi:

- 1) Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak artinya H_1 diterima

Berdasarkan nilai probabilitas atau tingkat signifikan ($\alpha=5\%$) dasar pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika probabilitasnya (α) $> 0,05$ maka H_0 diterima
- 2) Jika probabilitasnya (α) $< 0,05$ maka H_0 ditolak itu artinya H_1 diterima.

Uji t digunakan untuk mengetahui bahwa variabel *independent* yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependent* yaitu tingkat kekayaan daerah (rasio PAD dengan total pendapatan), tingkat ketergantungan pusat (rasio DAU dengan total pendapatan), penyediaan infrastruktur (rasio belanja modal dengan total belanja), dan pengawasan inspektorat.

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

H_0 : artinya variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

H_a : artinya variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

2. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi untuk mengukur seberapa besar peranan variabel *dependent* yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel *independent* yaitu tingkat kekayaan daerah (rasio PAD dengan total pendapatan), tingkat ketergantungan pusat (rasio DAU dengan total pendapatan), penyediaan infrastruktur (rasio belanja modal dengan total belanja), dan pengawasan inspektorat. Nilai koefisien determinasi (R^2) antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi, Hari Priyo. 2005. “Dampak Desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)”. *Jurnal Interdisipliner Kritis Universitas Kristen Stya Wacana (Terakreditasi)*.
- Ni Ketut Sandi, I Gusti Ayu Made Asri Dwijaputri, A.A.N.B Dwirandra “Kemampuan Alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (studi pada Kota Bali)”. *Jurnal Buletin studi ekonomi vol.21 no 1 Feb 2016*
- Erdy Adyatma, Rachmawati Meita oktaviani “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi (studi pada Kabupaten/ kota provinsi jawa tengah)”, *Dinamika Akuntansi keuangan perbankan November 2015*.
- Arifianti, Hermin dan Payamta dan Sutaryo. 2013. “Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)”. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado, 25-28 September 2013.
- Marfiana, Nadya dan Kurniasih, Lulus. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- Mifti, Sri. Lestariyo, Nugroho Budi dan Kowanda, Anacostia. 2009. “Pengawasan Internal dan Kinerja”. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Nomor 3 Voume 14 Agustus 2009. Universitas Gunadarma.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriarsi, Debby. 2012. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007”. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. [Internet].[diunduh tanggal 14 Januari 2014]. Tersedia: <http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>.

**PERANAN LAPORAN KINERJA INSTASI
PEMERINTAH TERHADAP NILAI SAKIP
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Oleh :

NAMA : RO'A SARIMALIA

NIM : 192510030

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS BINA DARMA

2019/2020

Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Tesis dengan Judul “Peranan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan” dapat diselesaikan dengan baik .

Pengambilan Tesis ini mengangkat tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018. Metode dan teknik penyusunan ini telah berpedoman dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hendaknya hasil ini menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja ke depan. Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di masa mendatang.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tahun mendatang dijadikan media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi semangat, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik, bagi nusa dan bangsa.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Tesis ini kami ucapkan terima kasih.

Penulis

Ro’a Sarimalia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas ini berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memberikan jawaban lebih jelas dan tegas tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat melakukan inisiatif sendiri sesuai dengan batasan-batasan tertentu serta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi baik nasional maupun internasional. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan kendala (*Threat*) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi strategis instansi pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta Pelaporan Kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014.

Arti Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan kinerja dan target kinerja,
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan,
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

KOMPONEN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

- PERENCANAAN KINERJA
Setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat baik di level outcome, output maupun input. (30)
- PENGUKURAN KINERJA
Setiap instansi melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dengan capaiannya. (25)
- PELAPORAN KINERJA
Setiap instansi melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari unit terbawah hingga tertinggi. (15)
- EVALUASI KINERJA
Setiap instansi melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi. (10)
- CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah pada kurun waktu satu tahun. (20)

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Hasil penilaian LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama kepemimpinan **Bapak Gubernur H. Alex Noerdin** dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan, dengan rincian kategori dan nilai sebagai berikut :

Tahun	Nilai Angka	Kategori	Interpretasi
2009	36,30	C	Kurang
2010	50,56	CC	Cukup
2011	58,96	CC	cukup
2012	65,18	B	baik
2013	68,20	B	baik
2014	70,66	B	baik
2015	75,11	BB	Sangat baik
2016	80,01	A	Memuaskan
2017	78,71	BB	Sangat Baik
2018	-	-	Belum ada penilaian direncanakan feb- 2020 mendatang

Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sistem Akip	Formal	Kualitas	Pemanfaatan	Total
Perencanaan Kinerja	7%	17,5%	10,5%	30%
Pengukuran Kinerja	4%	10%	6%	25%
Pelaporan Kinerja	3%	7,5%	4,5%	15%
Evaluasi Kinerja	2%	5%	3%	10%
Kinerja	Output	Outcome	Lainnya	Total
Capaian Kinerja	5%	5%	10%	20%

80 %

Di dalam kaitannya dengan kinerja, cascade diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hilarkis. Proses ini dapat dilakukan hingga level paling rendah yaitu sampai tingkat individu sehingga terjadi keselarasan peran di seluruh tingkat unit organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Pengaruh Nilai SAKIP pemerintah prov. Sumsel terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Bagaimana prosedur evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Seberapa besar pengaruh Komitmen Kepala Perangkat Daerah Laporan kinerja Instansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk menganalisis pengaruh nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Nilai SAKIP Prov. Sumsel
- 1.3.2. Untuk menganalisis pengaruh Komitmen Kepala Perangkat Daerah Terhadap Nilai SaKIP
- 1.3.3. Menganalisis pengaruh Relevansi anggaran / efisiensi anggaran

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang kesesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Bagi Universitas Bina Darma
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan bagi Universitas serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian topik serupa di masa yang akan datang.
3. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada organisasi sektor publik.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. (Syahrudin Rasul;2002,8)

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Laporan Kinerja

Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1. Komponen Rencana Kinerja

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi:

a. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya.

b. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program- program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

d. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja

Menurut LAN (2003:13) indikator didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok sebagai berikut:

- a. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh
- f. capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
- g. Penetapan indikator kinerja yang baik sangatlah penting karena indikator kinerja dapat dijadikan suatu dasar dalam mengukur suatu kinerja. Dengan adanya indikator kinerja kita dapat mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan.
- h. Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup kinerja keuangan dan non keuangan. Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No:239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja instansi pemerintah didasarkan pada masing-masing satuan kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya.
- j. Kinerja instansi pemerintah difokuskan pada pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas di lingkungan pemerintah. fokus pengukuran kinerja dapat untuk setiap satuan kinerja atau entitas yang .

mencakup (Mahsun 2006: 198):

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran
2. Tugas pokok dan fungsi
3. Struktur organisasi dan personalia
4. Program kerja
5. Anggaran

D. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi (LAN, 2003:25). Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak

Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana dana publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah dana tersebut dibelanjakan secara ekonomis,

efektif, dan efisien. Evaluasi kinerja merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintahan atau organisasi tertentu untuk menilai kinerja para aparatur yang lamban. Evaluasi kinerja untuk memotivasi para aparatur untuk meningkatkan kinerjanya dan melakukan perbaikan pada waktu

mendatang.

E. Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Mahsun dkk, 2007: 56).

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, oleh karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanat untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Renyowijoyo 2003: 21).

Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam:

1. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan

dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tuntutan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal tidak hanya akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor

publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam buku (Mardiasmo 2002: 22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atau kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

G. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik PERMENPAN (2013: 3). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut LAN (2003: 5):

- a) Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara
- b) Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
- c) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
- d) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- e) Jujur, obyektif, transparan, dan akurat
- f) Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

H. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya good governance.

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi dan lingkungannya
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

I. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengertian LKjIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis (LAN 2003: 4). LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan setahun sekali.

J. CASCADING

Cascade merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti:

1. large amount of something that flows or hangs down (sesuatu yang mengalir atau atau menggantung ke bawah)
2. something arranged or occurring in the series or in a succession of stages so that each stage derives from or acts upon the product of the preceding (sesuatu yang tersusun atau terjadi dalam rangkaian tahap-tahap sehingga setiap tahap diperoleh dari atau bertindak sebagai turunan dari tahap sebelumnya)
3. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed on (Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa informasi atau pengetahuan, yang diteruskan secara berturut-turut).
4. A succession of devices or stages in a process, each of which triggers or initiates the next.

LKjIP menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan instansi pemerintah. Di samping itu, perlu juga dimasukkan dalam LKjIP aspek keuangan yang secara langsung mengkaitkan hubungan antara anggaran Negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal terdiri dari; Ikhtisar eksekutif, pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, penutup, lampiran (PERMENPAN: 53 tahun 2014) yang mana sebelum diajukan ke kementerian sebagai Laporan Kinerja harus di review terlebih dahulu oleh Inspektorat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

a. Ikhtisar Eksekutif (Executive summary)

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala

yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah- langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I - Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

3. Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Dokumen penetapan kinerja tersebut berupa:

1. Rencana Strategis
Pada bagian ini berisi uraian singkat tentang rencana strategis instansi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran
2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran *strategis* organisasi
3. Rencanakinerjatahunan(RKT)
Formulir RKT berisi mengenai sasaran strategis dari suatu instansi sesuai dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari instansi.
4. Perjanjian kinerja
Formulir perjanjian kinerja berisikan target tahunan dari setiap sasaran dan indikator sasaran

4. Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

5. Bab IV - Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

6. Lampiran-lampiran

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan- perhitungan, gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu dilampirkan.

5. Waktu Penyampaian LKjIP

Penyusunan LKjIP P harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktivitas di lingkungan instansi pemerintah. Mengingat LKjIP merupakan media pertanggungjawaban dan juga menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah, maka LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik. LKjIP tersebut harus disampaikan secepat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

6. Manfaat LKjIP

Dengan adanya pelaksanaan reformasi maka dapat diketahui bahwa , LKjP memiliki manfaat menurut LAN (1994:4) adalah sebagai berikut :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya

7. Mekanisme Pelaporan

LKjIP disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang melibatkan pihak yang berwenang membuat dan menerima LKjIP, serta pengguna LAKIP. Instansi yang harus dan berwenang membuat LKjIP adalah Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi:

Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat. Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara. Setiap pemimpin Departemen/LPND, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) pada satuan kerja perangkat daerah (skpd) di lingkungan pemerintah kota Palembang oleh Hasni Yusrianti, Rika Henda Safitri

2.3. Kerangka Berfikir

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti ragu dan tesis yang berarti benar. Jadi, hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis termasuk salah satu proposisi di samping proposisi-proposisi lainnya. Hipotesis dapat dideduksi dari proposisi lainnya yang tingkat keberlakuannya lebih universal. Oleh karena itu, hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pertanyaan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran (Anwar, 2011 ;44). Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Komitmen Pimpinan

BAB III

METODE PENELITIAN

PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

Menurut Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Dengan upaya mendapatkan dan mengumpulkan data dari kegiatan penelitian, digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Pendekatan dalam Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara/upaya lebih untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Penelitian Kuanlitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan peroses makna. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari catatan lapangan, dokumen realisasi anggaran, dokumen capaian kinerja dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Tujuan dari metode ini adalah Pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan secara mendalam pada suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan di kaji. Dan data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata ataupun gambar dari pada angka. Penelitian dilaksanakan ketika berinteraksi langsung dalam tempat kejadian. Peneliti melakukan pengamatan, mencatat, mencari tahu, menggali sumber yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu.

Hasil yang didapat segera disusun saat itu juga. Apa yang sudah diamati pada umumnya tidak lepas dari konteks lingkungan dimana kejadian itu berlangsung.

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apa bila berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

2. KEHADIRAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. sedangkan instrument pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat Bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrument pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan atau sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan.

3. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan, Beberapa Perangkat Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam kategori Penunjang VISI DAN MISI dan Gubernur Sumatera Selatan.

4. SUMBER DATA

1. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan disertakan dokumen pendukung. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari data capaian Perangkat Daerah yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Sumatera Selatan. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan cara pengambilan data laporan atau Dokumen capaian dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemangku jabatan yang membidangi SAKIP.

5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu dalam data capaian Kinerja melalui Aplikasi *e-performance*. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana proses dalam realisasi anggaran dan data capaian kinerja dalam per tri wulan.

Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perkembangan, dan sebagainya tentang data capaian dan penyerapan anggaran dalam per triwulan. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.

Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang SAKIP.

6. ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

7. PENGECEKAN KEABSAHAN TEMUAN

Menurut Moleong ''kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu :

- (1) kepercayaan (kreadibility),
- (2) keteralihan (tranferability),
- (3) kebergantungan (dependibility),
- (4) kepastian (konfermability).

Dalam penelitian kualitatif ini memakai 3 macam antara lain :

1. Kepercayaan (kreadibility)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik : teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan refrensi.

2. Kebergantungan (dependibility)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dipendability oleh ouditor independent oleh dosen pembimbing.

3. Kepastian (konfermability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

8. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Moleong mengemukakan bahwa ''Pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu :

- (1) tahap sebelum ke lapangan,
- (2) tahap pekerjaan lapangan,
- (3) tahap analisis data,
- (4) tahap penulisan laporan''.

Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

- a) Tahap sebelum kelapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan permohonan ijin kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian.
- b) Tahap pekerjaan lapangan, meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- c) Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melauai observasi, dokumen dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai ,dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan

makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

- d) Tahap penulisan laporan, meliputi : kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan Tesis yang kemudian ditindaklanjuti hasil bimbingan tersebut dengan penulis skripsi yang sempurna. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian tesis.

IV. Daftar Pustaka

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991

Moh. Nazir. Ph. D, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003

Prof. Dr. S. Nasution, M.A. *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta 2004

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Akbar, Rusdi., Pilcher, Robyn dan Perrin, Brian. 2012. Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government. *Pacific Accounting Review* (Vol. 24 No. 3; 262-291).

Bastian, Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta, 2006 BPKP, Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

BPKP, Jakarta, 2007

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**PENGARUH ANALISIS RASIO
PROFITABILITAS DENGAN KUALITAS LABA
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
NILAI PERUSAHAAN**



NAMA : ENY KHARMILLA

NIM : 192510044

KELAS : MM34B

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS BINA DARMA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas proposal ini.

Pengaruh Analisis Rasio Profitabilitas dengan Kualitas Laba *Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan adalah judul proposal ini dari mata kuliah Metodologi Riset, yang menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, secara umum tujuan utama suatu perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran kemakmuran tiap perusahaan jika hal ini dapat tercapai, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan karena para investor semakin ingin terus berinvestasi pada perusahaan yang bersangkutan ditambah dengan *good corporate governance* maka akan semakin meningkatkan nilai perusahaan.

Saya menyadari bahwa tugas yang saya kerjakan ini belum sepenuhnya sempurna, dan saya mohon kritik dan saran kepada para pembaca.

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan proposal ini dan juga saya haturkan terima kasih kepada bapak Dr. Muji Gunarto, S.Si., M.Si. selaku dosen mata kuliah Metodologi Riset, semoga ilmu yang telah bapak berikan kepada saya menjadi berkahNya sebagai aset bagi saya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ini di masa yang akan datang. Semoga proposal ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penelitian

1.4. Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Profitabilitas

2.1.2. Laba

2.1.3. Corporate Governance

2.1.4. Nilai Perusahaan

2.2. Penelitian Terdahulu

2.3. Kerangka Berpikir

2.4. Hipotesis Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

3.1.1. Penelitian Eksploratif

3.1.2. Penelitian Uji Hipotesis

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

3.2.2. Sampel

3.3. Defenisi Operasional Variabel

3.4. Instrumen Penelitian

3.4.1. Uji Reliabilitas

3.4.2. Uji Validitas

3.5. Teknik Pengambilan Data

3.6. Teknik Analisis Data

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan secara umum didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Manager (*agent*) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui mengenai keadaan internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik perusahaan atau para pemegang saham (*principal*). Namun seringkali manager (*agent*) sebagai pihak pengelola perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang hanya mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan pihak lain yang berkepentingan terutama *principal* sehingga menimbulkan masalah keagenan. (Rasyid dan Kostaman, 2013). Penerapan *Good Corporate Governance* telah menjadi kebutuhan bagi semua perusahaan. Melihat situasi persaingan yang semakin ketat antara satu perusahaan dengan lainnya, maka diperlukan upaya untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* yang baik agar pengelolaan perusahaan terjadi secara efektif dan efisien yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam penelitian fundamental, yakni dengan membaca beberapa jurnal dari penelitian-penelitian terdahulu ditemukanlah adanya *research gap* yaitu pada variabel *corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. (Lastanti dan Salim, 2018) dan pada jurnal lainnya ditemukan bahwa mekanisme *corporate governance* pada variabel kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh

pada nilai perusahaan. (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian kembali untuk membuktikan fenomena mana yang sebenarnya terjadi apakah sesuai dari salah satu fenomena tersebut ataukah akan terbukti temuan yang baru dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Akibat adanya ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya sehingga mendorong peneliti berupaya untuk menggali lebih lanjut variabel-variabel yang berkenaan pada penelitian ini yaitu variabel rasio profitabilitas, kualitas laba, nilai perusahaan dan mekanisme *corporate governance* yang diproksikan pada kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit. Dengan demikian peneliti memberi judul yaitu “Pengaruh Analisis Rasio Profitabilitas Dengan Kualitas Laba, *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan” .

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan adalah : (1) apakah rasio profitabilitas dapat mempengaruhi kualitas laba? (2) apakah rasio profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan? (3) apakah kualitas laba dapat mempengaruhi nilai perusahaan? (4) apakah mekanisme *corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit dapat mempengaruhi nilai perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas pada

kualitas laba, (2) untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap nilai perusahaan, (3) untuk mengetahui pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan, (4) untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap hal-hal tersebut di atas.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dimana nilai perusahaan sebagai variabel dependen menjadi semakin tinggi meningkat menandakan semakin makmur perusahaan tersebut yang didukung oleh beberapa variabel independen lainnya dan juga variabel interveningnya, dan dimungkinkan bisa dikembangkan lagi dengan menambah atau mengganti variabel independennya bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan dapat digunakan menjadi bahan referensi atau bahan pertimbangan dan juga menambah wacana dalam penelitian.

2. Secara terapan, diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan suatu perusahaan atau organisasi dalam mengembangkan perusahaannya dengan indikator yaitu kondisi nilai perusahaannya yang meningkat dan juga didukung dengan kualitas laba yang baik serta tata kelola perusahaan yang baik pula sehingga bisa mengatasi konflik keagenan dalam hubungan antara *agent* dan *principal* agar terjalin kerjasama yang baik sehingga dapat mewujudkan tujuan utama suatu perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Profitabilitas

Dalam dunia bisnis kita tentu mengenal istilah profit, kata ini merujuk pada keuntungan yang diperoleh atas suatu kegiatan usaha, sedangkan profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan (*profit margin*), total aktiva (*return on asset*) maupun modal sendiri (*return on equity*) (Sartono, 2002) dalam (Dewi dan Wirajaya, 2013). Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Salah satu alat untuk mengukur profitabilitas disebut rasio profitabilitas, dimana rasio profitabilitas ini diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan yang biasanya dinilai oleh investor dan kreditur untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh sehingga dapat menilai kemampuan perusahaan membayar hutang kreditur. Kondisi perusahaan dimana nilai rasio profitabilitasnya semakin meningkat maka kondisi ini diasumsikan semakin baik. Nilai rasio yang tinggi ini melambangkan tingkat laba dan efisiensi

perusahaannya baik, sehingga sebagai indikatornya bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas, dimana kondisi ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya peningkatan rasio profitabilitas akan berpengaruh positif pada kualitas laba dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.2. Laba

Laba atau keuntungan, upaya mendapatkan laba yang maksimal adalah salah satu harapan suatu perusahaan sedangkan kerugian menjadi salah satu hal yang harus dihindari oleh perusahaan. Menurut Pariwiyati (1996) dalam Siallagan (2009) bahwa keberhasilan dan kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan informasinya diukur dari keadaan laba. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa laba merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Pemberian bentuk pengawasan yang berupa : (1) penyusunan lapangan keuangan periodik dan (2) adanya fungsi auditing yang bersifat independen yang berdasarkan kinerja dalam perusahaan dimana manajer diberi reward seperti insentif agar dapat mengurangi konflik yang terjadi dengan si pemilik perusahaan. (Francis dan Wilson, 1998) dalam (Siallagan, 2009). Apabila kurang mengetahui tentang kualitas informasi atas laba hal ini akan berdampak bisa terjadinya kebohongan yang disengaja dilakukan oleh penyajinya untuk menyesatkan para pengguna laporan keuangan tersebut. Laba yang kurang berkualitas bisa terjadi jika yang menjalankan operasional perusahaan seperti manajer dan si pemilik perusahaan bukan orang yang sama. Dengan adanya pemisahan kepemilikan ini dapat menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan dalam pengelolaan perusahaan,

konflik ini tidak terlepas dari kecenderungan manajer untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan para pemilik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi kualitas laba yang baik akan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan demikian perlu adanya kerjasama yang baik antara manajer dengan si pemilik perusahaan agar dapat mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.1.3. *Corporate Governance*

Salah satu faktor yang ikut menentukan reputasi perusahaan adalah adanya *Good Corporate Governance*. Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak manajer perusahaan dengan mengesampingkan kepentingan investor. Hal ini akan membuat investor kehilangan kepercayaan terhadap pengembalian investasi yang telah diinvestasikan pada perusahaan. Hubungan agensi muncul ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Variabel-variabel yang tercakup dalam mekanisme *corporate governance* diproksikan pada :

1. Kepemilikan Manajerial

Permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik perusahaan. Dari peneliti terdahulu seperti (Lastanti dan Salim, 2018) dan (Apriada dan Suardhika, 2016)

menemukan hubungan yang positif signifikan antara *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.

2. Kepemilikan Institusional

Saham-saham dari sektor keuangan perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi dan dana pensiun, para *stakeholder* ini mempunyai kepemilikan institusional atau kepemilikan saham. (Aminudin, 2004) dalam (Siregar dan Pambudi, 2014). Dengan adanya kepemilikan saham yang besar oleh institusi maka akan mendorong peningkatan pengawasan (*monitoring*) yang lebih optimal dan efektif terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat meminimalisasi konflik keagenan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Haruman, 2007) dalam (Siregar dan Pambudi, 2014) Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional atau kepemilikan saham yang besar oleh institusi maka akan mendorong peningkatan dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal dan efektif.

3. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen bertugas untuk menjembatani kepentingan *shareholder* dan *manager* akibat perselisihan yang terjadi. Selain itu tugasnya juga mengawasi kebijakan manajemen dan melakukan *review* atas implementasi strategi jangka panjang yang akhirnya diungkapkan sebagai informasi untuk *stakeholder*. Kelengkapan memberikan sinyal positif dimana investor semakin

tertarik untuk berinvestasi, sehingga nilai perusahaan meningkat. Berdasarkan penelitian (Putri & Suprasto, 2016) dan (Surjadi & Tobing, 2016) ditemukan pengaruh positif signifikan antara *corporate governance* diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen dan nilai perusahaan.

4. Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal juga. Laporan keuangan yang kredibel akan menjadi indikator bahwa kondisi kualitas laba yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Waterhouse (1980) dalam Kawatu (2009) mengatakan bahwa investor, analisis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan.

2.1.4. Nilai Perusahaan

Tujuan utama sebuah perusahaan bukanlah memaksimalkan laba tetapi yang lebih utama adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai nilai perusahaan yang semakin meningkat ini merupakan prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemiliknya juga meningkat. Menurut Christiawan dan Tarigan (2007:3) ada lima konsep yang menjelaskan nilai perusahaan yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, nilai pasar, nilai buku, dan nilai likuidasi. Nilai nominal adalah (nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan). Nilai intrinsik merupakan (konsep yang paling abstrak yaitu nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan

menghasilkan keuntungan di kemudian hari). Nilai pasar merupakan (harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham). Nilai buku adalah (nilai perusahaan yang dihitung dengan konsep akuntansi). Nilai likuidasi adalah (nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi). Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Lastanti dan Salim, (2018)	Pengaruh Pengungkapan n CSR, GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan	- CSR - GCG -Kinerja Keuangan -Nilai Perusahaan	Kuantitatif	(1)Variabel pengungkapan CSR, GCG dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. (2)Variabel

					GCG dengan proksi kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan (3) Pengungkapan CSR, GCG dengan proksi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit dan kinerja keuangan sebagian tidak berpengaruh signifikan
--	--	--	--	--	---

					terhadap nilai perusahaan
2	Siregar dan Pambudi, (2019)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan ROE Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Tekstil Dan Garment Yang Terdaftar Di BEI periode 2010-2014	- Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan Institusional -ROE -Nilai Perusahaan	Kuantitatif	(1)Secara parsial variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (2)Variabel kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. (3)Variabel ROE berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

3	Siallagan dan Machfoedz, (2006)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan	- <i>Corporate Governance</i> -Kualitas laba -Nilai perusahaan -Akrual diskresioner	Kuantitatif	(1) Mekanisme <i>corporate governance</i> mempengaruhi kualitas laba, -Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. -Komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba. (2) Kualitas laba positif mempengaruhi nilai perusahaan. (3) Mekanisme CG mempengaruhi nilai perusahaan.
---	---------------------------------	--	--	-------------	---

					(4) Kualitas laba bukan merupakan variabel pemediasi pada hubungan antara mekanisme CG dan nilai perusahaan.
4	Kawatu, (2009)	Mekanisme CG Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	-CG -Nilai perusahaan -Kualitas laba -Akrual diskresioner	Kuantitatif	(1) Mekanisme CG mempengaruhi kualitas laba ini terdiri dari : -Kepemilikan manajerial positif dipengaruhi kualitas laba -Dewan komisaris mempengaruhi kualitas laba

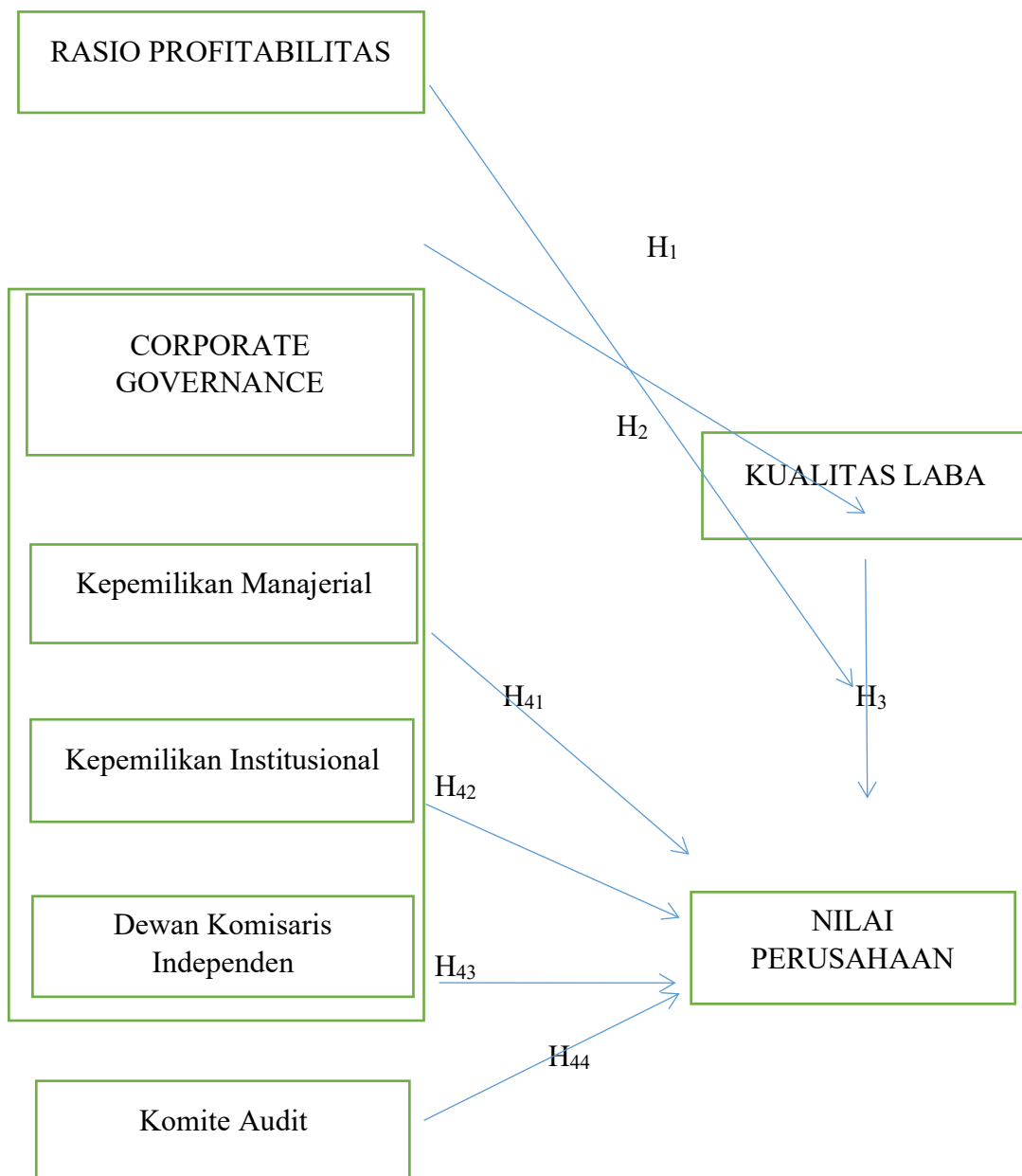
					secara negatif. -Komite audit secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba (2) Kualitas laba secara positif mempengaruhi nilai perusahaan (3) Mekanisme CG mempengaruhi nilai perusahaan. (4) Kualitas laba bukan merupakan variabel pemediasi (intervening variable) pada hubungan antara mekanisme CG
--	--	--	--	--	---

					dan nilai perusahaan
5	Dewi dan Wirajaya, (2013)	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan	-Struktur modal - Profitabilitas -Ukuran perusahaan -Nilai perusahaan	Kuantitatif	(1) Struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan pada nilai perusahaan (2) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan.

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menyatakan bahwa rasio profitabilitas diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kualitas laba, sehingga dapat juga meningkatkan nilai perusahaan. Begitupun untuk praktek mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional, dewan komisaris independen dan komite audit diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan dengan adanya tata kelola yang baik dalam perusahaan yang dapat berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian jika kondisi kualitas laba yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai

perusahaan, karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan menjadi indikator bahwa perusahaan tersebut semakin maju dan makmur dan diminati oleh para investor untuk berinvestasi dalam pengembangan perusahaan.



2.4. Hipotesis Penelitian

Dari semua uraian kajian teori tersebut diatas mengenai pengaruh-pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat dirumuskan hipotesis-hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

H₂ : Rasio profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

H₃ : Kualitas laba secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

H₄₁ : *Corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

H₄₂ : *Corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

H₄₃ : *Corporate governance* dengan proksi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

H₄₄ : *Corporate governance* dengan diproksikan ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

3.1.1 Penelitian Eksploratif

Penelitian eksploratif bertujuan menjadikan penelitian Rasio Profitabilitas dengan Kualitas Laba *Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi-informasi penting bagaimana peranan variabel-variabel independen seperti rasio profitabilitas, kualitas laba dan peranan *corporate governance* dapat secara optimal meningkatkan variabel dependen dalam hal ini nilai perusahaan. Hal ini akan berdampak positif bagi para investor untuk berinvestasi dalam mengembangkan perusahaan. Tujuan lainnya yaitu untuk mengeksplorasi masalah atau situasi untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman, dimana jenis penelitian eksploratif peneliti ini tergolong penelitian kausalitas (tingkat hubungan dan pengaruh antara variabel penelitian). Penelitian kausalitas adalah penelitian yang fokus pada subjek tertentu yang memang memiliki keunikan tertentu yang berbeda subjek yang lainnya pada umumnya untuk membuktikan adanya hubungan pengaruh antar variabel penelitian.

3.1.2. Penelitian Uji Hipotesis

Dalam penelitian uji hipotesis peneliti akan menggunakan data empiris yang merupakan sumber penyusunan hipotesis dengan prosedur objektif didasarkan

atas informasi yang diperoleh dengan menganalisis untuk menerima hipotesis tersebut dengan simbol H_a atau menolak hipotesis dengan simbol H_0 .

$H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen.

$H_a : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen.

H_0 : hipotesis awal yang menyatakan tidak ada pengaruh antara variabel-variabel independen yaitu rasio profitabilitas (RP), kualitas laba (KL) dan *corporate governance* (CG) yang diproksikan pada kepemilikan manajerial (KM), kepemilikan institusional (KI), dewan komisaris independen (DKI) dan komite audit (KA) terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan (NP) dan peneliti akan membuktikan dari data empiris untuk mendapatkan hipotesis-hipotesis sebagai berikut :

H_1 : adanya pengaruh positif antara RP terhadap KL

H_2 : adanya pengaruh positif antara RP terhadap NP

H_3 : adanya pengaruh positif antara KL terhadap NP

H_{41} : adanya pengaruh positif antara CG pada KM terhadap NP

H_{42} : adanya pengaruh positif antara CG pada KI terhadap NP

H_{43} : adanya pengaruh positif antara CG pada DKI terhadap NP

H_{44} : adanya pengaruh positif antara CG pada KA terhadap NP

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur di bidang industri. Alasan dipilihnya industri manufaktur karena jenis usaha di dalamnya adalah paling besar di BEI, sehingga penelitian ini diharapkan bisa memperoleh keragaman data yang diperlukan peneliti untuk hasil penelitian yang akurat.

3.2.2. Sampel

Untuk pengambilan sampelnya dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu :

1. Penerbitan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap dengan periode tertentu.
2. Penyajian laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode tertentu.
3. Perusahaan memperoleh laba bersih selama periode tertentu.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yaitu menjelaskan variabel-variabel baik itu variabel terikat (dependen) maupun variabel bebas (independen).

1. Variabel terikat (dependen)

Nilai perusahaan adalah variabel dependen yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q yang memberikan informasi paling baik karena memasukan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan.(Putri & Suprasto,

2016) Dengan hal ini, nilai perusahaan akan lebih konservatif jika Tobin's Q di atas satu, maka investasi perusahaan dipandang baik karena artinya prospek perusahaan semakin baik. Perusahaan akan memberikan jaminan yang besar karena memiliki *market value* lebih besar dibanding *book value*, sehingga investor mau melakukan pengorbanan lebih.

$$Q = \frac{(EMV + D)}{(EBV + D)}$$

Q : Nilai Perusahaan

EMV : *Equity Market Value* yang diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan akhir dengan jumlah saham beredar pada akhir tahun

EBV : *Equity Book Value* yang diperoleh dari selisih total aset dan liabilitas

D : Nilai Buku Total Hutang

2. Variabel bebas (independen)

A. Rasio Profitabilitas yaitu variabel yang diukur dengan ROA (*Return On Asset*)

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

B. *Corporate governance* yang diproksikan dengan Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial dapat mengawasi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer. Dengan meningkatkan kepemilikan saham dekom dan direksi, diharapkan manajer dapat bertindak sesuai keinginan principal karena

manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Kepemilikan manajerial adalah *presentase* saham dewan komisaris dan direksi.

$$KM = \frac{\text{Total Saham Dewan Komisaris \& Direksi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

C. *Corporate governance* yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, serta mengurangi biaya agen. Menurut Sukirni (2012), mendefenisikan kepemilikan institusional sebagai proporsi saham di bawah 5% oleh investor institusional, seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perbankan dan dana pensiun.

$$KI = \frac{\text{Total Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

D. *Corporate governance* yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independen

Non executive director bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal. Dalam penelitian *corporate governance* proporsi dewan komisaris independen diukur dengan bentuk *presentase*. (Susanto & Carningsih, 2013).

$$DKI = \frac{\text{Total Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

E. *Corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran Komite Audit

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan tim manajemen sesuai prinsip *corporate governance*. Menurut Siallagan & Machfoedz (2006) mengukur komite audit berdasarkan jumlah anggota komite audit di perusahaan dalam jumlah satuan.

$$KA = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

F. Kualitas Laba

Indikator dikatakan laba itu berkualitas apabila memenuhi beberapa hal yaitu merupakan penjumlahan dari akrual diskresioner dan arus kas dari operasional perusahaan. Laba juga dapat disebut sebagai pendapatan operasional perusahaan, sedangkan akrual diskresioner itu meliputi aset perusahaan, total revenue perusahaan, gaji pegawai dan lain sebagainya.

$$\text{Operating Income} = \alpha + \beta_1 \text{Cash Flow} + \beta_2 \text{Accrual} + e$$

Tabel 3.3. Operasional Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1	NP	Rasio Tobin's Q	$EMV + D / EBV + D$	Rasio
2	RP	<i>Return On Asset</i>	Proporsi <i>Net Income</i> / Jumlah Aset	Rasio
3	CG pada KM	Stok Kepemilikan dari Pihak Manajer	Proporsi KSPM / JSB	Rasio

4	CG pada KI	Stok Kepemilikan dari Pihak Investor Institusi	Proporsi KSII / JSB	Rasio
5	CG pada DKI	Mendorong dan Menerapkan GCG	Proporsi JKI / JADK	Rasio
6	CG pada KA	Membantu dan Melaksanakan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris	Komite Audit = Jumlah Anggota Audit	Satuan
7	KL	<i>Operating Income</i>	$OI = \alpha + \beta_1 CF + \beta_2 ACCR + e$	Rasio

Keterangan :

EMV : *Equity Market Value*

EBV : *Equity Book Value*

D : Nilai Buku Total Hutang

KSPM : Kepemilikan Saham Pihak Manajerial

JSB : Jumlah Saham beredar

KSII : Kepemilikan Saham Investasi Institusional

JKI : Jumlah Komisaris Independen

JADK : Jumlah Anggota Dewan Komisaris

CF : *Cash Flow*

ACCR : *Accrual*

α : Tingkat Signifikasi

β : Koefisien Regresi

e : Koefisien Penyimpangan

3.4. Instrumen Penelitian

3.4.1. Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama (tes dengan tes ulang) akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip (reliabilitas antar penilai). Reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Suatu ukuran bisa disebutkan tidak reliabel atau tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang-ulang memberikan hasil yang berbeda-beda. Objek dari pengukuran alat uji reliabilitas adalah data berbentuk skala sikap atau data berbentuk ordinal.

3.4.2. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengkaji sejauh mana suatu alat ukur berbentuk kuesioner dapat mengukur apa yang hendak diukur, atau sejauh mana alat ukur yang digunakan agar tepat sasaran. Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tersebut semakin mengenai saarannya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Uji validitas hanya dapat dipergunakan jika data berbentuk ordinal dan tidak bisa dipergunakan jika data berbentuk interval atau data bersifat kuantitatif.

3.5. Teknik Pengambilan Data

Peneliti dalam hal ini menggunakan data sekunder yaitu dengan cara metode dokumentasi adalah dengan mencari, mengumpulkan, mencatat, mengkaji data mengenai hal-hal atau variabel baik itu variabel bebas maupun variabel terikat. Sumber data dokumentasi tersebut dikumpulkan dari dokumen, buku, jurnal-jurnal *website* dan lain sebagainya.

3.6. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisa data statistik dalam penelitian ini yaitu

1. Analisis Regresi Linear Sederhana, metode analisis ini untuk menjawab hipotesis H_1 yaitu mencari adakah pengaruh antara Rasio Proitabilitas pada Kualitas Laba, dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha + \beta RP + e_1$$

Y_1 = KL (Nilai variabel dependen dalam observasi atau percobaan ke-1)

α = Parameter pertama dari persamaan regresi yang menunjukkan nilai Y apabila X (Variabel independen) = 0

β = Parameter kedua dari persamaan regresi menunjukkan slope dari garis regresi.

e_1 = *Random error* dalam observasi atau percobaan ke-1, berkaitan dengan proses sampling.

2 .Analisis Regresi Linear Berganda, metode analisis ini untuk menjawab hipotesis H₂, H₃, H₄₁, H₄₂, H₄₃ dan H₄₄ yaitu mencari adakah pengaruh antara variabel Rasio Profitabilitas, Kualita Laba, *corporate governance* yang diproksikan pada Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan, dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 RP + \beta_2 KL + \beta_3 KM + \beta_4 KI + \beta_5 DKI + \beta_6 KA + e_2$$

Y_2 = NP (Nilai dari variabel dependen dari observasi ke-2)

α = Nilai Y bila X (variabel-variabel independen = 0)

β_1 - β_6 = Koefisien regresi berhubungan dengan masing-masing variabel independen

e_2 = *Random error* dari observasi ke-2

DAFTAR PUSTAKA

- Lastanti, S.H & Salim, N (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntans.i Trisakti*, Vol.5, No.1, Hal. 27
- Siregar, G.I & Pambudi, E. J (2014). Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Return On Equity Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Tekstil Dan Garment Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2014, Hal. 75-87
- Siallagan, H & Machfoedz, M (2006). Mekanisme Corporate Governance Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, No.61, Hal. 23-26
- Darwis, H (2012). Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.16, No.1, Hal. 45-55
- Kawatu, S.F (2009). Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.13, No.3, Hal.405-417
- Dewi, M.S.A & Wirajaya, A (2013). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 Bali*. Vol.2, Hal. 358-372

Siallagan, H (2009). Pengaruh Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol.1, No.1

Hidayah, N (2015). Pengaruh IOS Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di BEI. *Jurnal Akuntansi*/Vol.XIX, No.03

Widjaja, P.F & Maghviroh, E.R (2011). Analisis Perbedaan Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Adanya Komite Pada Bank-Bank Go Public Di Indonesia. *The Indonesian Accounting Review* Vol.1, No.2

Putri, A.R & Christiawan, J.Y (2014). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap pengungkapan CSR. *Business Accounting Review*, Vol.2, No.1

Rasyid, R & Kostaman, J.E (2013). Analisis Pengaruh Mekanisme GCG Dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Tingkat Obligasi. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Vol. No.1

Apriada, K & Suardhika, S.M (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Struktur Modal Dan Profitabilitas Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.2 : 201-218.

Putri, I.A.S & Suprasto, B. (2016). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 15.(1),667-694.

Hurriyanti, R. & Gunarto, M (2019) *Metode Statistik Bisnis untuk Bidang Ilmu Manajemen dengan Aplikasi Program SPSS*, PT Refika Aditama, Bandung.

Budiyanto, F. dkk (2019). Analisis Pengaruh Real Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan sebelum dan saat Implementasi IFRS dengan IFRS sebagai Variabel Moderasi, *Prosding Seminar Nasional Pakar ke-2*, Buku 2 : Sosial dan Humaniora.



**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN
RESPONSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Tesis Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar**

MAGISTER MANAJEMEN

Oleh :

**HERLINA
MANAJEMEN KEUANGAN
192510026**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN
PALEMBANG
2020**



**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN
RESPONSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TESIS

Oleh :

**HERLINA
MANAJEMEN KEUANGAN
192510026**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN
PALEMBANG
2020**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Republik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good governance. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat[1].

Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah.

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus

mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik[2].

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 memunculkan jenis akuntabilitas baru, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Dalam hal ini terdapat tiga jenis pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu (1) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan pembantuan, dan (3) pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)[1].

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja instansi. Kinerja instansi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari tujuan, misi dan visi instansi pemerintah yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab.

Sesuai UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI

melakukan audit/pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan bagian dari rangkaian proses akuntabilitas pemerintah daerah. Audit atas LKPD yang dilakukan oleh BPK-RI akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD yang memuat opini. Tiga jenis laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang merupakan satu kesatuan, yaitu: (1).LHP atas Laporan Keuangan yang mengungkapkan opini Laporan Keuangan (Buku 1); (2).LHP atas Sistem Pengendalian Intern (Buku 2); dan (3).LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Buku.3)[3].

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah provinsi sumatera selatan”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan pada SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Bagaimana responsibilitas pengelolaan keuangan pada SKPD di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Bagaimana Kinerja Instansi SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- 5) Seberapa besar pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 6) Seberapa besar pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 7) Seberapa besar pengaruh responsibilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 8) Seberapa besar pengaruh akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis responsibilitas pengelolaan keuangan pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 6) Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 7) Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh responsibilitas pengelolaan keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 8) Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pengelolaan keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1) Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S2) pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Binadarma.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah akuntansi sektor publik.
- c. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas Pengelolaan Keuangan, dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dalam pengorganisasian kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awam mengenai pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsibilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. AKUNTABILITAS PEMERINTAH

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan, aktivitas-aktivitas serta kinerja organisasi yang diukur secara obyektif dalam bentuk pelaporan atau penjelasan kepada pihak internal maupun eksternal organisasi[4].

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya[5].

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari

perspektif akuntansi, American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap[1]:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. *Probity and legality accountability*

Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).

2. *Process accountability*

Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).

3. *Performance accountability*

Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).

4. Program *accountability*

Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).

5. *Policy accountability*

Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*)

2.2. TRANSPARASI

Menurut KNKG (2006) Transparansi merupakan kondisi dimana lembaga menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi maksudnya adalah bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pihak pemangku kepentingan[6].

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah[5].

2.3. RESPONSIBILITAS

Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauhmana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah di atur. Responsibilitas mengukur tingkat partisipasi pemberi

layanan melaksanakan tugasnya. Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan[7].

Menurut Ratminto dan Winarsih (2007) responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lenvine (1990) responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implicit[4].

Dalam sebuah hasil kajian tahun 2006 mengenai pengembangan ukuran penilaian GEG (Good Eksekutif Governance) yang menghasilkan indikator dalam prinsip responsibilitas menyebutkan enam indikator, yaitu[7]:

- 1) Kejelasan tanggung jawab dan wewenang.
- 2) Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang.
- 3) Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya manusia).
- 4) Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.
- 5) Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana.
- 6) Memiliki kebijakan mengenai metode kerja.

2.4. PENGELOLAAN KEUANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut[8].

Dalam pasal 1 PP. No. 105/ 2000 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut[2].

2.4.1. PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI

PEMERINTAH

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Sebagaimana telah disepakati dalam seminar Undang-undang Perbendaharaan Negara, tanggal 30 Agustus 1970[8].

Secara lebih spesifik, Halim (2002:159) menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi keuangan terhadap[8]:

1. Akuntabilitas

Yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya – sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

2. Manajerial

Yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.

3. Transparansi

Yaitu menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

2.4.2. KEWAJARAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Kewajaran tidak hanya mengandung pemikiran mengenai netralitas di dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan saja, namun juga mengandung pemikiran mengenai keadilan dari hasil yang dikeluarkan (kewajaran dalam distribusi). Pemikiran mengenai kewajaran dalam distribusi dilatarbelakangi oleh perkembangan dalam akuntansi yang semula lebih mengutamakan perspektif individualistis bergeser menuju perspektif masyarakat. Pemikiran yang menitikberatkan perspektif masyarakat/sosial ini memunculkan kerangka akuntabilitas[3].

Mengenai kualitas laporan keuangan, Belkaoui dengan mengutip dari Laporan Trueblood menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dari laporan keuangan hendaknya sebagian besar didasarkan pada kebutuhan para pengguna laporan. Informasi hendaknya sejauh mungkin bebas dari bias pembuatnya. Dalam melakukan pengambilan keputusan, para pengguna hendaknya tidak hanya memahami informasi yang disajikan,

namun juga hendaknya mampu menilai keandalannya dan membandingkannya dengan informasi mengenai peluang-peluang alternatif dan pengalaman sebelumnya. Di setiap kasus, informasi akan lebih berguna jika ia ditekankan pada substansi ekonomi daripada bentuk tekniknya[3].

Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan beberapa karakteristik kualitatif yang perlu dipenuhi sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, yaitu:

- 1) relevan;
- 2) Andal;
- 3) Dapat dibandingkan;
- 4) Dapat dipahami.

2.5. KINERJA

Kinerja digunakan untuk mengukur hasil yang telah dicapai sehubungan dengan kegiatan atau aktivitas perusahaan, apakah kinerja perusahaan telah baik atau perlu adanya evaluasi-evaluasi kebelakang mengenai hasil yang dicapai[9]. Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan organisasi kecil maupun besar. Hasil kerja yang dicapai oleh organisasi atau karyawan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi dan publik. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu.

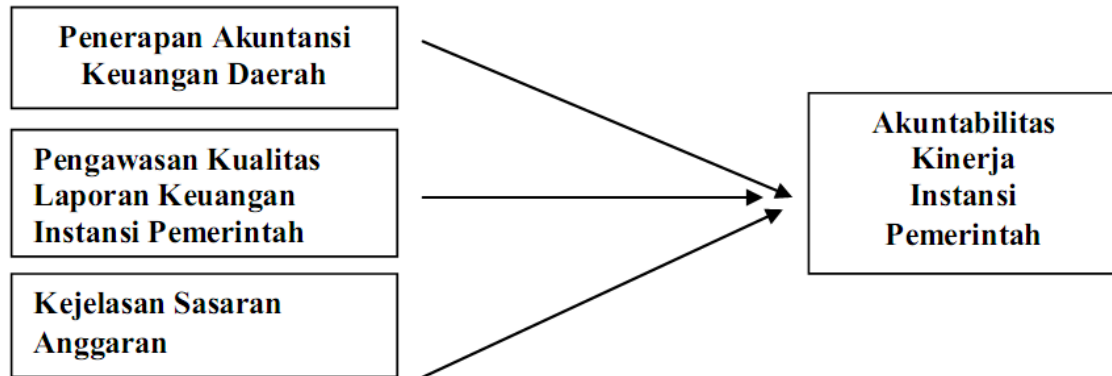
2.6. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel. 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan - Arja Sadjarto	1) Menetapkan sasaran dan tujuan program tertentu 2) Merencanakan program kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut 3) Mengalokasi sumber daya untuk pelaksanaan program 4) Memonitor dan mengevaluasi results untuk menentukan apakah ada kemajuan yang diperoleh dalam mencapai sasaran dan tujuan tersebut 5) Memodifikasi perencanaan program untuk meningkatkan kinerja	pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan	Pengukuran kinerja dikelompokkan dalam tiga kategori indikator, yaitu 1) Indikator pengukuran service efforts, 2) Indikator pengukuran service accomplishment, dan 3) Indikator yang menghubungkan antara efforts dengan accomplishment.
2.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Darwanis dan Sephi Chairunnisa	1) Penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh. 2) Penerapan akuntansi keuangan daerah	pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan	Analisis Regresi Linear Berganda 1) Uji Validitas 2) Uji Reliabilitas

		berpengaruh secara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh. 3) Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh secara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh. 4) Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh.		
--	--	---	--	--

2.7. KERANGAKA BERFIKIR



Gambar 2.1. Skema Paradigma Penelitian

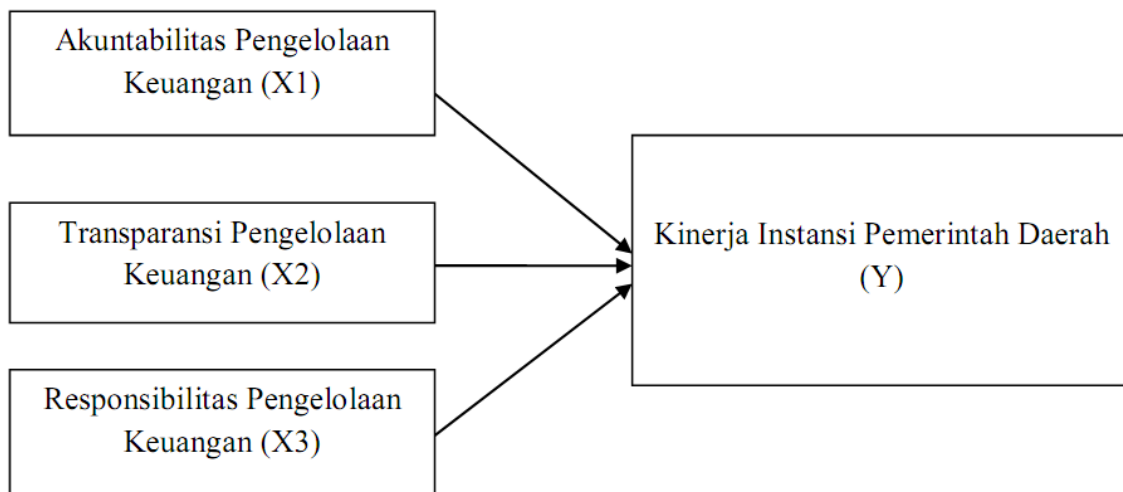
2.8. HOPOTESIS PENELITIAN

- 1) Penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian adalah ilustrasi dari kejadian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah provinsi sumatera selatan”, maka desain penelitian yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Desain Penelitian

Jika dijabarkan secara matematis, hubungan variabel tersebut adalah:

$$Y = F (X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

X_1 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

X_2 = Transparansi Pengelolaan Keuangan

X_3 = Responsibilitas Pengelolaan Keuangan

Y = Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

F = Fungsi

3.2. POPULASI DAN SAMPLE

3.2.1. POPULASI PENELITIAN

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti[10]. Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi "finit" dan populasi "infini". Populasi finit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti diketahui, sedang populasi infinit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan pada Tim Anggaran, baik pria maupun wanita.. Adapun jumlah populasi di adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Populasi Penelitian pada Tim Anggaran

Nama Instansi	Populasi
Dinas Pekerjaan Umum	8
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9
Dinas Kesehatan	9
Dinas Komunikasi dan Informatika	8
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	7
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan	8
Dinas Pemuda dan Olah Raga	8

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	8
Dinas Pendidikan	7
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9
Dinas Perhubungan	7
Dinas Pangan dan Pertanian	8
Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	6
Dinas Penataan Ruang	7
Dinas Tenaga Kerja	6
Jumlah	144

3.2.2. TEKNIK SAMPLING

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian (sampel sendiri secara harfiah berarti contoh)[11]. Hasil pengukuran atau karakteristik dari sampel disebut "statistik" yaitu $\bar{X}$ untuk harga rata-rata hitung dan S atau SD untuk simpangan baku.

Pengambilan sampel (sampling) adalah metoda sistematis untuk pemilihan subjek yang akan diteliti. Berikut ini diuraikan beberapa istilah umum yang perlu dipahami di dalam sampling, antara lain[12]:

- 1) Unit observasi (unit analisis), yaitu unit dasar yang dijadikan objek observasi dalam penelitian.
- 2) Populasi, yaitu himpunan unit observasi yang lengkap dan utuh, terdiri dari nilai atau ukuran peubah-peubah yang bersifat majemuk.
- 3) Sampel, yaitu himpunan unit observasi (bagian dari populasi) yang memberikan keterangan atau data untuk suatu penelitian, terdiri dari nilai atau ukuran peubah-

peubah yang bersifat terbatas jumlahnya. Sampel diperlukan apabila ukuran populasi penelitian relatif besar.

- 4) Sampel representatif, yaitu himpunan unit observasi yang dianggap cukup mewakili karakteristik tertentu yang dimiliki populasi.

Menurut Arikunto (2008:116) penentuan pengambilan sampel sebagai berikut: Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari[13]:

- 1) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.
- 2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana.
- 3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik.

Berdasarkan pertimbangan maka peneliti mengambil sample sebanyak 25% dari jumlah populasi. Jadi sampel yang diambil adalah: $25\% \times 144 \text{ populasi} = 36$ responden yang terdiri dari 18 SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dari perhitungan tersebut jumlah sampel pada setiap dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

Nama Instansi	Populasi	Perhitungan	Sampel
Dinas Pekerjaan Umum	8	$25\% \times 8 = 2$	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	$25\% \times 10 = 2,5$	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	$25\% \times 9 = 2,25$	2
Dinas Kesehatan	9	$25\% \times 9 = 2,25$	2
Dinas Komunikasi dan Informatika	8	$25\% \times 8 = 2$	2
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan	7	$25\% \times 7 = 1,75$	2

Menengah			
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	$25\% \times 9 = 2,25$	2
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	$25\% \times 10 = 2,5$	2
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan	8	$25\% \times 8 = 2$	2
Dinas Pemuda dan Olah Raga	8	$25\% \times 8 = 2$	2
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	8	$25\% \times 8 = 2$	2
Dinas Pendidikan	7	$25\% \times 7 = 1,75$	2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	$25\% \times 9 = 2,25$	2
Dinas Perhubungan	7	$25\% \times 7 = 1,75$	2
Dinas Pangan dan Pertanian	8	$25\% \times 8 = 2$	2
Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	6	$25\% \times 6 = 1,5$	2
Dinas Penataan Ruang	7	$25\% \times 7 = 1,75$	2
Dinas Tenaga Kerja	6	$25\% \times 6 = 1,5$	2
Jumlah populasi	144	Jumlah sampel	36

3.3. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen merupakan suatu alat yang dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data dari suatu variabel[14]. Instrumen ini memiliki peranan serta kegunaan yang sangat penting dikarenakan bila kita tidak mempunyai instrumen dalam mendapatkan data penelitian, maka dapat mengakibatkan kita salah dalam mengambil kesimpulan dalam penelitian serta mengalami kesulitan dalam melakukan pengelompokan dan pengolahan data yang relevan dalam penelitian tersebut.

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial[15]. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka jawaban-jawaban tersebut diberi angka atau nilai.

Tabel 3.3. Bobot Penilaian Kuesioner

No	Pilihan Jawaban	Skor Positif
1	Sangat Kurang	1
2	Kurang	2
3	Cukup	3
4	Baik	4
5	Sangat Baik	5

3.4. Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Pada penelitian ini digunakan dua buah jenis uji yaitu Uji Validitas dan Uji Reabilitas, adapun tujuan dari pengujian untuk meningkatkan proses pengumpulan data dan agar penyebaran kuesioner instrumen-instrumen penelitian tersebut menjadi valid dan reliabel (reliable).

3.4.1. Uji Validitas

Pengujian Validitas ini bertujuan untuk mengetahui kualitas suatu data/instrumen yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu data/instrumen sehingga derajat ketepatan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti[16].

Konsep validitas tes dapat dibedakan atas tiga macam yaitu[14]:

- 1) Validitas isi (content validity),
- 2) Validitas konstruk (construct validity), dan
- 3) Validitas empiris atau validitas kriteria.

Validitas internal (validitas butir) termasuk kelompok validitas kriteria yang merupakan validitas yang diukur dengan besaran yang menggunakan tes sebagai suatu kesatuan (keseluruhan butir) sebagai kriteria untuk menentukan validitas butir dari tes itu. Dengan demikian validitas internal memperlakukan validitas butir dengan menggunakan hasil ukur tes tersebut sebagai suatu kesatuan sebagai kriteria, sehingga biasa juga disebut validitas butir. Validitas internal diperlihatkan oleh seberapa jauh hasil ukur butir tersebut konsisten dengan hasil ukur tes secara keseluruhan. Oleh karena itu validitas butir tercermin pada besaran koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total tes. Jika koefisien korelasi skor butir dengan skor total tes positif dan signifikan maka butir tersebut valid berdasarkan ukuran validitas internal[14].

Untuk menghitung validitas internal untuk skor butir dikotomi digunakan koefisien korelasi biserial (r_{bis}) dengan rumus:

$$r_{bi(i)} = \frac{X_i - X_t}{S_t} \sqrt{\frac{p_i}{q_i}} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

$r_{bi(i)}$ = koefisien korelasi antara skor butir ke i dengan skor total.

X_i = rata-rata skor total responden yang menjawab benar butir ke i.

X_t = rata-rata skor total semua responden.

S_t = standar deviasi skor total semua responden.

p_i = proporsi jawaban yang benar untuk butir ke i.

q_i = proporsi jawaban yang salah untuk butir ke i.

Selanjutnya, dikatakan bahwa untuk menghitung koefisien validitas internal untuk skor butir politomi digunakan korelasi product moment (r) dengan rumus:

$$r_{it} = \frac{\sum X_i X_t}{\sqrt{\sum X_i^2 \sum X_t^2}} \dots\dots\dots (3)$$

Dengan:

r_{it} = koefisien korelasi antara skor butir soal dengan skor total

$\sum x_i$ = jumlah kuadrat deviasi skor dari X_i

$\sum x_t$ = jumlah kuadrat deviasi skor dari X_t

3.4.2. UJI REALIBILITAS

Reliabilitas berasal dari kata reliability berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah.

Koefisien reliabilitas konsistensi gabungan butir untuk skor butir dikotomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Kuder-Richardson yang dikenal dengan nama KR-20 (Djaali, 2000: 77) dengan rumus[14]:

$$KR - 20 = \frac{k}{k-1} \left(\frac{\sum p_i q_i}{S_t^2} \right) \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

k = cacah butir.

$p_i q_i$ = varians skor butir.

p_i = proporsi jawaban yang benar untuk butir nomor i.

q_i = proporsi jawaban yang salah untuk butir nomor i .

S_t^2 = varians skor total responden.

3.5. TEKNIK PENGAMBILAN DATA

Dalam penelitian ini, teknik yang dipakai dalam pengambilan data[17]:

1) Teknik deskripsi

Teknik ini merupakan teknik dalam upaya penulisan menggunakan data data informasi yang didapat yang selanjutnya dirumuskan kedalam permasalahan yang ada.

2) Teknik kompilasi

Dalam teknik ini penulis melakukan suatu pembandingan, baik dari perancangan yang dibuat maupun dari data-data informasi yang didapat.

Pada penelitian ini sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu[18]:

4) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti atau mewakilinya dimana peneliti melakukan percobaan sendiri.

5) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dan digunakan berupa pengetahuan teoritis yang didapat penulis selama ini, buku-buku referensi yang relevan, serta dari hasil penjelajahan (browsing) di internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6. ANALISIS DATA DAN RANCANGAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Dalam kegiatan menganalisis data langkah-langkah yang penulis lakukan sebagai berikut:

- 1) Peneliti mengambil data dengan cara metode random sampling, dimana pengambilan anggota sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu sebesar 25% dari populasi.
- 2) Setelah pengambilan data ditentukan, lalu ditentukan alat pengukuran untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki. Alat pengukuran yang digunakan penelitian ini berupa daftar pernyataan dalam kuesioner (angket).
- 3) Penulis membuat kuesioner dalam bentuk pernyataan yang akan diberikan dan diisi oleh responden. Daftar kuesioner tersebut disebarkan kepada team anggaran di SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setiap kuesioner terdapat pernyataan positif yang memiliki 5 jawaban dengan masing-masing nilai yang berbeda.
- 4) Pada saat data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk menilai variabel independen dan variabel dependen, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan dalam skala pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif adalah skala likert.

Alat analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis berganda (multiple regression). Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut[16]:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e \dots\dots\dots (5)$$

Dimana:

α = Konstanta

X_1 = Pengetahuan Pegawai

β_1 = Koefisien Regresi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Sadjiarto, "Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 2, pp. 138–150, 2000.
- [2] M. Sukoco, Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (*APBD*). .
- [3] T. Leviany and M. Roja, "Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bpk-Ri Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015," *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 1, p. 885, 2016.
- [4] R. Setiyani and D. A. Utama, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru," *Din. Pendidik.*, vol. 9, no. 2, pp. 100–114, 2014.
- [5] S. Hanifah Indah and P. Sugeng, "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)," *J. Ilmu Ris. Akunt.*, vol. 4, no. 8, 2015.
- [6] I. Yuliafitri and A. N. Khoiriyah, "Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat)," *Islam. J. Ekon. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 205–218, 2016.
- [7] S. Muslimah, *Responsibilitas pelayanan publik pada rsud salewangan kabupaten maros*. 2016.
- [8] Darwanis and S. Chairunnisa, "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," *J. Telaah dan Ris. Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 150–174, 2013.
- [9] D. K. Sofyan, "Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Kerja Pegawai BAPPEDA," *Malikussaleh Ind. Eng.*, vol. 2, no. 1, pp. 18–23, 2013.
- [10] Supardi, "Populasi dan Sampel Penelitian," *Unisia*, vol. 13, no. 17, pp. 100–108, 1993.
- [11] Rozaini Nasution, "Teknik Sampling." Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, pp. 1–7, 2003.
- [12] Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," *ComTech Comput. Math. Eng. Appl.*, vol. 5, no. 2, pp. 1110–11118, 2014.
- [13] F. Beno, P. Rumapea, and S. Rompas, "Pengaruh Kompetensi Kepala Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa Di Kecamatan Sahu Timur," *Adm. PUBLIK*, pp. 1–9.
- [14] Z. Matondang, "Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian," *J. Tabularasa PPS unimed*, vol. 6, no. 1, pp. 87–97, 2009.
- [15] M. Muslihudin and A. W. Arumita, "Pembuatan Model Penilaian Proses Belajar Mengajar Perguruan Tinggi Menggunakan Fuzzy Simple Additive Weighting (SAW) (Studi : STMIK Pringsewu)," *Semin. Nas. Teknol. Inf. dan Multimed.* 2016, vol. 4, no. 11, pp. 31–36, 2016.
- [16] I. Coryanata, "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

- Dan Pengawasan Keuangan Daerah,” *J. Account. Invest.*, vol. 12, no. 2, pp. 110–125, 2012.
- [17] Zulhipni Reno Saputra, “Simulator Penghitung Jumlah Kendaraan Pada Pintu Masuk Dan Keluar Berbasis Arduino,” *J. Sist. Komput.*, vol. 2, no. 2, pp. 98–104, 2017.
- [18] Zulhipni Reno Saputra, “Perancangan Voip Tri Bok Pada AMIK SIGMA,” *J. Manaj. dan Inform. Sigmata*, vol. 4, no. 2, pp. 9–16, Apr. 2016.